

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGHARUI
NILAI TUKAR PETANI DI PROVINSI RIAU**

OLEH :

SATRIA IRAWAN
164210037

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pertanian*



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGHARUI NILAI
TUKAR PETANI DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

NAMA : Satria Irawan
NPM : 164210037
JURUSAN : AGRIBISNIS

**KARYA ILMIAH INI TELAH DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN
KOMPREHENSIF YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 28 JUNI
2021 DAN TELAH DISEMPURNAKAN SESUAI SARAN YANG TELAH
DISEPAKATI SERTA KARYA ILMIAH INI MERUPAKAN SYARAT
PENYELESAIAN STUDI PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

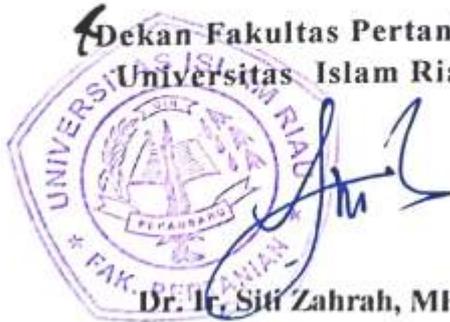
MENYETUJUI

Dosen Pembimbing



Dr. Elinur, SP., M.Si

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Islam Riau**



Dr. Ir. Siti Zahrah, MP

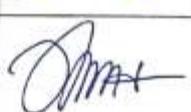
**Ketua Program Studi
Agribisnis**



Sisca Vaulina SP., MP

**KARYA ILMIAH INI TELAH DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN
KOMPREHENSIF FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ISLAM
RIAU**

TANGGAL 28 JUNI 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Elinur, SP., M.Si	KETUA	
2	Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec	ANGGOTA	
3	Khairizal, SP., MMA	ANGGOTA	
4	Ilma Satriana Dewi, SP., M.Si	NOTULEN	

Kata Persembahan



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau”. Yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pertanian pada Jurusan Agribisnis Universitas Islam Riau.

Skripsi dan gelar kebanggaan ini saya persembahkan sebesar-besarnya untuk almarhum ayah saya Sujatri Bin Rahamin yang semasa hidup telah menjadi sosok ayah yang hebat sehingga mampu membimbing dan mendidik anaknya hingga pada titik bahagia saat ini, dan untuk ibunda saya tercinta R.Suryani yang selalu menjadi ibu terkuat untuk mendukung saya dalam berbagai hal.

Terima kasih untuk kedua orang tua dan adik-adik saya tercinta yang tanpa henti-hentinya memberikan semangat dukungan moril dan materi serta do'a bagi saya dalam menjalani kehidupan pendidikan selama ini.

Terima kasih kepada keluarga besar Rengat dan keluarga besar Kampar yang selama ini terus memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas Pertanian, dosen-dosen, dan para staff yang selama ini telah menerima dan membantu saya dalam masa perkuliahan.

Terima kasih kepada teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan serta seangkatan 2016, teman-teman Rengat In Peace, BHDP, dan Ananta yang selama ini telah memberikan masukan-masukan dan motivasi.

Satria Irawan

BIOGRAFI PENULIS



Satria Irawan dilahirkan di Rengat pada tanggal 16 September tahun 1998, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Sujatri dan ibu R.Suryani. Penulis mengawali pendidikan di SDN 019 Kampung Dagang Rengat pada tahun 2004 hingga lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 002 Rengat dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMAS PGRI Rengat dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima menjadi mahasiswa di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau”. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT akhirnya penulis melaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 28 Juni 2021 dan dinyatakan lulus ujian dan berhak menyandang gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau.

Satria Irawan., SP

ABSTRAK

Satria Irawan (164210037). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau. Bimbingan Ibu Dr. Elinur, SP., M.Si

Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau cenderung mengalami penurunan, besarnya permanan sektor pertanian terhadap kontribusi PDRB dan penyerapan tenaga kerja menjadi pertanyaan terhadap kesejahteraan para petani di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, (1) Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Kementrian Pertanian, data yang digunakan bersifat *time series* dari tahun 2003 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau pada beberapa periode berada dibawah angka 100, ini mengindikasikan betapa rendahnya daya beli petani Riau dan adanya penurunan tingkat kesejahteraan petani pada periode tersebut. Kondisi tersebut membuat nilai indeks harga yang dibayar petani (Ib) menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai indeks harga yang diterima petani (It). Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau selama periode pengamatan tahun 2003 – 2019 mengalami penurunan sebanyak 10 kali, dan kenaikan sebanyak 6 kali, pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pada periode tersebut cenderung mengalami penurunan sebesar 35,40 persen. Penurunan ini disebabkan redahnya indeks yang dibayarkan petani (Ib) daripada indeks yang diterima petani (It), dalam kurun waktu 17 tahun indeks yang diterima petani (It) mengalami penurunan sebesar 71,99 persen dan perubahan pada indeks yang dibayarkan (Ib) petani menurun sebesar 59,21 persen, penurunan terhadap indeks yang diterima petani (It) lebih besar dibandingkan penurunan indeks yang dibayarkan (Ib) petani. Hasil estimasi model regresi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau (1) Produksi dan Harga Rata-Rata Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi berpengaruh positif terhadap Nilai Tukar Petani, dan (2) Inflasi, Upah Buruh Tani, dan harga BBM berpengaruh negatif terhadap Nilai Tukar Petani. Dari hasil penelitian diharapkan adanya intervensi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan untuk melindungi produsen, meningkatkan kualitas produksi pertanian agar menjadikannya lebih bernilai tambah, pendekatan dan pengenalan teknologi pertanian kepada petani agar mampu meningkatkan efisiensi biaya dan waktu.

Kata Kunci : *Nilai Tukar Petani, Kesejahteraan Petani, Indeks Yang Dibayarkan Petani, Indeks Yang Diterima Petani*

ABSTRACT

Satria Irawan (164210037). Analysis of Factors Affecting Farmers' Exchange Rates in Riau Province. Mentor by Dr. Elinur, SP., M.Si

Farmers' Exchange Rates (NTP) in Riau Province tend to experience a decline, the magnitude of the agricultural sector's contribution to GDP contribution and employment is a question of the welfare of farmers in Riau Province. This study aims to analyze, (1) the development of the exchange rate of farmers in the province of Riau, (2) the factors that affect the exchange rate of farmers in the province of Riau. The research method used is descriptive method and quantitative method using multiple linear regression analysis approach. The data used in this study are primary data obtained from the publications of the Central Statistics Agency and the Ministry of Agriculture, the data used are time series from 2003 to 2019. The results show that the Farmer's Exchange Rate in Riau Province in several periods is below 100, This indicates how low the purchasing power of Riau farmers and a decrease in the level of welfare of farmers in that period. This condition makes the value of the price index paid by farmers (Ib) to be higher when compared to the value of the price index received by farmers (It). Farmer's Exchange Rate (NTP) in Riau Province during the 2003 - 2019 observation period decreased 10 times, and increased 6 times, the growth of Farmer's Exchange Rate (NTP) in that period tended to decrease by 35.40 percent. This decrease was due to the lower index paid by farmers (Ib) than the index received by farmers (It), within 17 years the index received by farmers (It) decreased by 71.99 percent and changes in the index paid by farmers (Ib) decreased. by 59.21 percent, the decrease in the index received by farmers (It) was greater than the decrease in the index paid for (Ib) by farmers. The estimation results of the regression model show that the factors that affect Farmers' Exchange Rates in Riau Province (1) Production and the Highest Average Retail Price of Subsidized Fertilizers have a positive effect on Farmers' Exchange Rates, and (2) Inflation, Farmer Wages, and Fuel Prices negative effect on Farmer's Exchange Rate. From the results of the study, it is expected that there will be government intervention to evaluate policies to protect producers, improve the quality of agricultural production to make it more value-added, approach and introduce agricultural technology to farmers in order to increase cost and time efficiency.

Keywords: Farmer Exchange Rate, Farmer Welfare, Index Paid by Farmers, Index Received by Farmer

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Di Provinsi Riau”.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral-spiritual dan material dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu Dr. Elinur, SP., M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu, pemikiran, maupun tenaga dalam memberikan bimbingan, motivasi, kritik dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam hasil penelitian ini masih banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penulisan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

Satria Irawan., SP

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Nilai Tukar Petani	10
2.2. Kesejahteraan	16
2.3. Teori Pembangunan Pertanian	21
2.4. Teori Kebijakan Pertanian	23
2.5. Regresi Linier Berganda	28
2.6. Penelitian Terdahulu	31
2.7. Kerangka Pemikiran	38
2.8. Hipotesis Penelitian	39
III. METODE PENELITIAN	40
3.1. Metode, Tempat, dan Waktu Penelitian	40

3.2. Teknik Pengambilan Data	40
3.3. Jenis dan Sumber Data	41
3.4. Konsep Operasional	41
3.5. Analisis Data	43
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif	43
3.5.2. Analisis Regresi Linear Berganda.....	44
IV. KEADAN UMUM DAERAH PENELITIAN	49
4.1. Keadaan Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau	49
4.2. Keadaan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan	51
4.3. Keadaan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Hortikultura	52
4.4. Keadaan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Perkebunan .	53
4.5. Keadaan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan	54
4.6. Keadaan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan	55
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	56
5.1. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau dan Variabel-Variabel Yang Mempengaruhinya	56
5.1.1. Perkembangan Produksi Sektor Pertanian di Provinsi Riau	61
5.1.2. Perkembangan Inflasi di Provinsi Riau	62
5.1.3. Perkembangan Upah Buruh Tani di Provinsi Riau	63
5.1.4. Perkembangan Harga Pupuk di Indoensia	64
5.1.5. Perkembangan Harga BBM di Indonesia	65
5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhui Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau	66
5.2.1. Uji Asumsi Klasik	66

5.2.2. Uji Hipotesis	68
5.2.3. Pengaruh Produksi Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau	71
5.2.4. Pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau	72
5.2.5. Pengaruh Upah Buruh Tani Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau	73
5.2.6. Pengaruh Harga Pupuk Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau	74
5.2.7. Pengaruh Harga BBM Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau	75
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	76
6.1 Kesimpulan	76
6.2 Implikasi Kebijakan dan Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

No	Halaman
1. PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian (Miliar Rupiah) Nasional	3
2. Produksi Sektor Pertanian Provinsi Riau.....	4
3. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 1999 – 2019	7
4. Sumber Data Penelitian	41
5. Penduduk Riau Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan	49
6. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019	50
7. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019	51
8. Nilai Tukar Petani Tanaman Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019	52
9. Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019	53
10. Nilai Tukar Petani Peternakan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019 ...	54
11. Nilai Tukar Petani Perikanan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019.....	55
12. Persentase Pertumbuhan NTP Provinsi Riau Tahun 1999 – 2019	57
13. Perubahan Indeks IT & IB Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019	59
14. Hasil Uji Normalitas	66
15. Hasil Uji Heteroskedasitas	67
16. Hasil Uji Multikolinearitas	67
17. Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson	68
18. Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau	69

DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
1. Pertumbuhan Perekonomian Indonesia dan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018	1
2. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 2018 – Agustus 2019 Provinsi Riau	5
3. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun 2010 - 2019	8
4. Alur kerangka Pemikiran	38
5. Pertumbuhan Nilai Tukar Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019	56
6. Perkembangan Nilai IT & IB Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019	58
7. Proporsi Produksi Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019	61
8. Perkembangan Infasi Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019	62
9. Perkembangan Rata-Rata Upah Buruh Tani Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019	63
10. Perkembangan Rata-Rata Harga Pupuk Indonesia Tahun 2003 – 2019	64
11. Perkembangan Harga BBM Indonesia Tahun 2003 – 2019	65

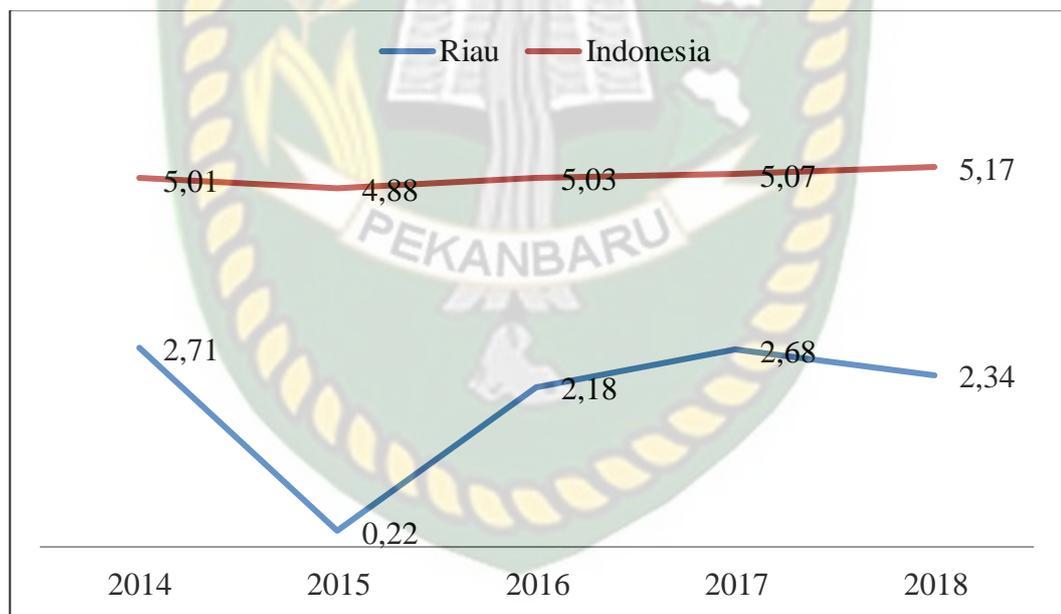
DAFTAR LAMPIRAN

No	Halaman
1. NTP, IT, dan IB Provinsi Riau 1999 – 2019.....	82
2. Produksi Sektor Pertanian Provinsi Riau 1999 – 2019 (Ton/tahun) ...	83
3. Upah Buruh Tani Provinsi Riau Tahun (Rp/Orang/Hari) 1999 – 2019.....	84
4. Harga Bahan Bakar (Rp/liter) 1999 – 2019	88
5. Harga Pupuk Subsidi Tahun (Rp/Kg) 1999 – 2019	89
6. Tabulasi Data Penelitian	90
7. Output Estimasi Model Regresi	91
8. Output Uji Normalitas	92
9. Output Uji Heteroskedasitas	93
10. Output Uji Multikolinearitas	94
11. Output Uji Autokorelasi	95
12. Perhitungan Elastisitas	96
13. Output Pengujian Pada Program SPSS	97

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi perekonomian negara Indonesia pada saat ini sedang dalam status memasuki tahap perbaikan setelah sebelumnya mengalami keterpurukan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 akibat adanya krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018 secara berturut-turut yaitu sebesar 5,01 persen; 4,88 persen; 5,03 persen; 5,07 persen; dan 5,17 persen. Sementara itu, Provinsi Riau dalam rentang waktu yang sama secara berturut-turut hanya mampu tumbuh sebesar 2,71 persen; 0,22 persen; 2,18 persen; 2,68 persen; dan 2,34 persen pada Gambar 1.



Gambar 1. Pertumbuhan Perekonomian Indonesia dan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2019

Diketahui bahwa perekonomian Provinsi Riau telah mengalami penurunan mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2015, namun pada tahun 2016 - 2018 ekonomi Riau perlahan tumbuh lebih baik, khusus tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Riau

sangat rendah sebagai dampak terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada masa itu.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang secara langsung menyangkut kelangsungan hidup masyarakat, juga merupakan sektor perekonomian dan lapangan pekerjaan yang berbasis sumber daya lokal, secara garis besar peranan sektor pertanian bagi setiap negara dalam melaksanakan pembangunan meliputi penyedia kebutuhan pangan pokok, penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa melalui ekspor, sumber pembentukan PDB, menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional, pengendali inflasi, penyedia input bahan baku bagi sektor industri, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan pendapatan masyarakat (Simatupang, 1992 dalam Rachmat, 2000).

Nurmala, et al (2012) menjelaskan bahwa peran sektor pertanian bagi masyarakat perdesaan sangat penting karena: (1) sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk desa (2) sektor pertanian termasuk subsektor peternakan merupakan lapangan kerja keluarga perdesaan terutama di desa-desa terpencil (3) usaha pertanian merupakan tempat lapangan kerja buruh tani dan petani berlahan sempit (4) pertanian menjadi sumber karbohidrat, protein nabati dan hewani, vitamin dan mineral dari tumbuhan bagi keluarga tani (5) usaha tani sebagai hobi dan kesenangan hidup dan juga sebagai tempat rekreasi penduduk kota jika ke desa (6) usaha pertanian sebagai penghasil bahan-bahan ritual keagamaan dan upacara-upacara tradisional penduduk di desa atau kota.

Salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah adalah dengan mengukur nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB pada

dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian (Juta Rupiah) Provinsi Riau

Kategori PDRB (Lapus)	PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahunan (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	108.969.037,30	113.287.591,50	119.281.644,10	124.599.684,40	129.732.367,70
Pertambangan dan Penggalian	108.549.184,60	103.958.451,80	97.348.953,10	92.012.614,01	85.633.732,92
Industri Pengolahan	126.882.608,40	132.525.102,30	139.717.111,90	144.761.098,80	153.305.450
Pengadaan Listrik dan Gas	239.829,79	272.247,04	275.066,50	284.544,46	324.432,81
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	62.674,66	62.395,16	65.360,83	65.213,47	66.478,69
Konstruksi	34.442.582,69	36.137.430,97	38.275.862,55	40.367.573,87	42.898.586,33
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	38.816.690,84	40.709.270,47	43.302.339,12	46.090.197,5	48.453.844,89
Transportasi dan Pergudangan	3.773.618,29	3.889.186,61	4.070.185,11	4.200.343,15	4.241.014,96
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.023.318,32	2.087.363,84	2.179.200,32	2.280.961,43	2.338.961,25
Informasi dan Komunikasi	3.700.665,06	3.883.710,55	4.094.531,97	4.323.757,59	4.725.659,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.241.598,05	4.481.269,64	4.380.999,62	4.584.209,82	4.592.221,08
Real Estate	4.026.522,95	4.087.725,56	4.223.508,1	4.376.729,38	4.610.554,9
Jasa Perusahaan	23.486,51	24.106,07	26.015,61	28.147,47	29.988,85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.227.912,82	8.203.390,02	8.282.843,22	8.364.073,85	8.597.340,2
Jasa Pendidikan	2.170.080,88	2.184.906,94	2.266.735,1	2.376.274,54	2.533.150,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	820.327,73	824.914,65	872.898,8	921.483,58	1.020.002,71
Jasa lainnya	2.021.824,61	2.150.276,93	2.320.255,66	2.521.477,53	2.742.118,33
PDRB	448.991.963,50	458.769.340,10	470.983.511,60	482.158.384,90	495.845.906,30
PDRB Tanpa Migas	358.545.638,20	371.747.943,50	388.634.442	404.162.605,70	423.858.347,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2019

Pada Tabel 1 sektor pertanian memiliki jumlah kontribusi PDRB kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan, meskipun pada tahun 2015 saat dimana

kondisi perekonomian Provinsi Riau mengalami penyusutan yang disebabkan oleh bencana alam pada masa itu, namun sektor pertanian tetap menghasilkan PDRB terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan dan setelahnya sektor pertanian mampu bangkit dan meningkatkan jumlah kontribusi PDRB setiap tahunnya.

Indikator pembentuk PDRB dari sektor yaitu merupakan nilai atau jumlah produksi yang dihasilkan dari usaha pertanian, besarnya output yang dihasilkan akan mempengaruhi seberapa besar nilai PDRB yang terbentuk dalam satuan unit sehingga perlu dilihat hasil produksi sektor pertanian dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Produksi Sektor Pertanian Provinsi Riau

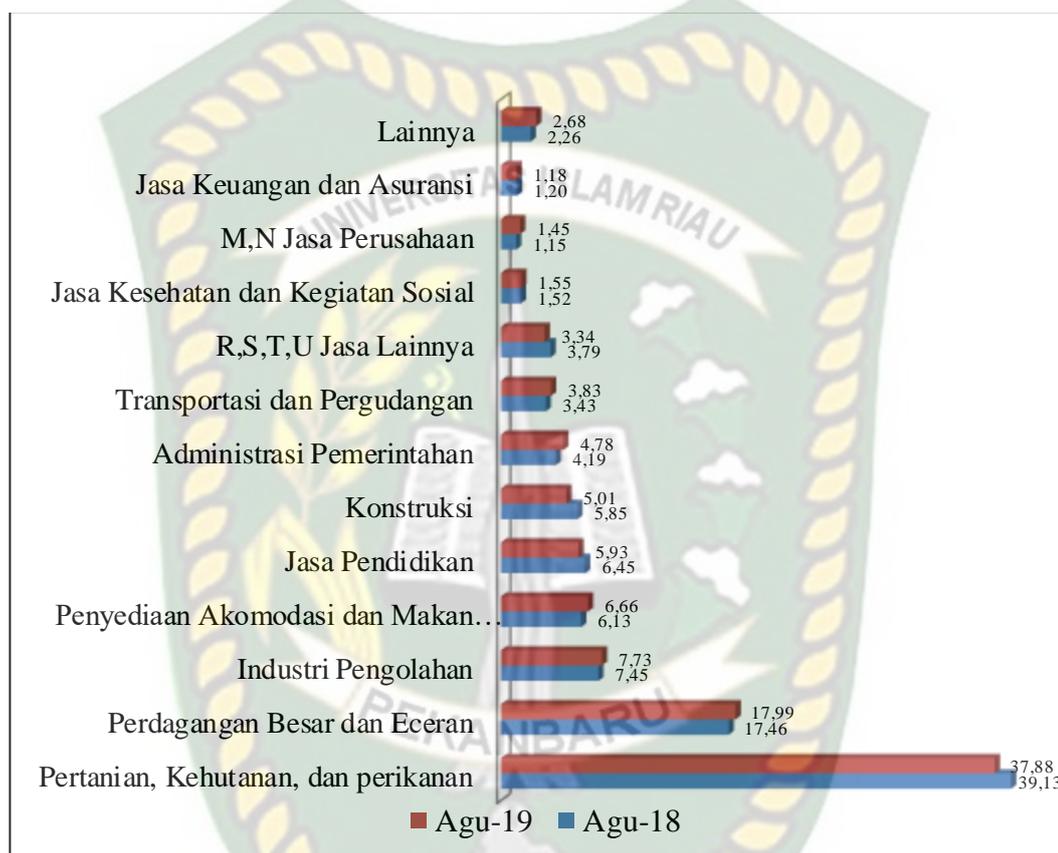
Kategori (Produksi)	2015	2016	2017	2018	2019
Tanaman Pangan	538.727,00	519.226,00	526.135,00	561.705,00	626.578,93
Tanaman Hortikultura	241.473,00	280.365,00	348.078,00	243.672,00	224.310,00
Tanaman Perkebunan Rakyat	9.020.947,00	8.578.017,00	8.910.709,00	8.445.923,00	8.261.779,00
Peternakan	68.830,68	71.320,83	76.166,35	97.728,92	96.574,26
Perikanan	178.238,24	190.869,48	212.278,30	143.921,51	145.411,01
Total Produksi	10.048.216,00	9.639.798,00	10.073.367,00	9.492.950,00	9.354.653,00
PDRB (Tanpa migas/Juta Rupiah)	358.545.638,20	371.747.943,50	388.634.442,00	404.162.605,70	423.858.347,40

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Berbeda dengan perkembangan PDRB produksi sektor pertanian justru mengalami fluktuasi yang berbeda setiap tahunnya, fluktuasi yang terjadi pada sektor pertanian juga tidak selaras dengan perkembangan PDRB yang terus meningkat setiap tahunnya.

Karena kontribusi PDRB sektor pertanian merupakan tingkat terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan maka hal ini berkaitan dengan pelaku dari usaha tersebut, dengan besarnya kontribusi PDRB sektor pertanian sehingga struktur dari tenaga kerja itu sendiri harus diperhatikan.

Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 37,88 persen; Perdagangan sebesar 17,99 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 7,73 persen pada Gambar 2.



Gambar 2. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2018 - Agustus 2019 Provinsi Riau

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Dilihat berdasarkan tren lapangan pekerjaan yang terjadi selama periode Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2019, lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,58%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,52%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,49%), Sementara persentase lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan (1,12%), Konstruksi (0,84%), Jasa Pendidikan (0,53%), Dari tahun 2018 – 2019 terlihat terjadi pengurangan persentase pekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,25%.

Keterkaitan kontribusi PDRB dan penyerapan tenaga kerja pada perekonomian erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan suatu negara maupun daerah yang mana hal tersebut tercakup dalam permasalahan pembangunan perekonomian, karena pada hakikatnya usaha pertanian dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dan suatu usaha bisa memiliki keuntungan maupun resiko.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari pelaku usaha pertanian atas usahanya dapat dilihat dengan menggunakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dengan asumsi jika nilai NTP berada diatas angka >100 maka diasumsikan bahwa kesejahteraan pelaku usaha pertanian dikatakan layak.

Jika dibandingkan dengan NTP di Provinsi Riau pada tahun 1999 – 2019 yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, NTP di Provinsi Riau mengalami fluktuasi yang berbeda setiap tahunnya, NTP tertinggi yang tercapai terjadi pada tahun 2000 sebesar 127,84, sedangkan NTP terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar 86,56, hal ini berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan PDRB dan penyerapan tenaga kerja, kontribusi sektor pertanian pada pendapatan PDB maupun PDRB selalu meningkat setiap tahunnya berbeda dengan tingkat pertumbuhan NTP yang selalu berfluktuasi dan tidak menetap setiap tahun pada angka yang seharusnya, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019

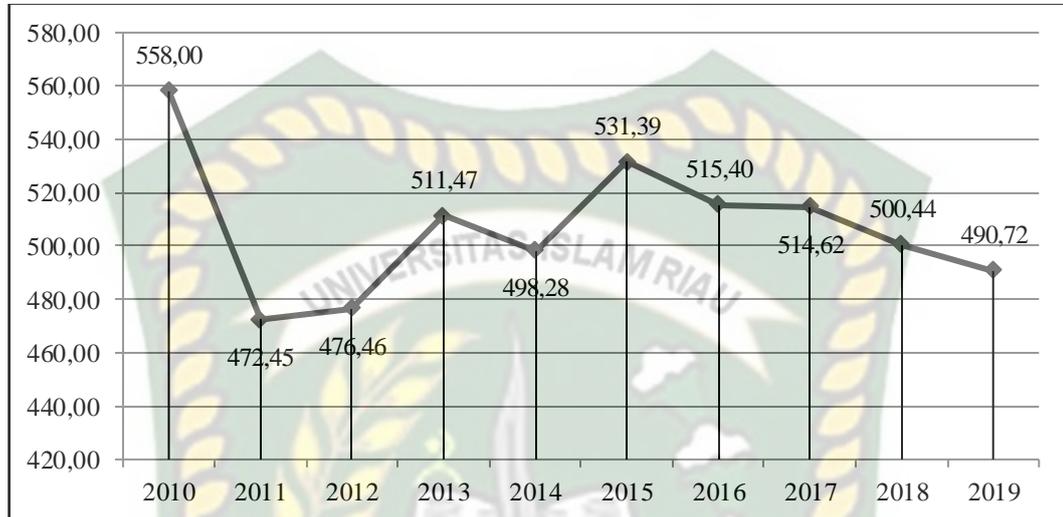
Tahun	Nilai Tukar Petani (NTP)
2003	139,14
2004	109,16
2005	88,13
2006	89,34
2007	86,56
2008	101,75
2009	109,59
2010	103,43
2011	105,13
2012	104,33
2013	101,54
2014	96,95
2015	95,24
2016	98,68
2017	102,97
2018	98,00
2019	95,58

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Di tengah pesatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian yang terus berlangsung, kesejahteraan petani sebagai produsen produk pertanian selalu saja terombang ambing akibat ketidakpastian ekonomi nasional, hal tersebut dapat dilihat dari fluktuasi yang terjadi pada Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani, setelah berbagai macam rencana dan strategi yang diimplementasikan pada sektor pertanian nasional hal tersebut belum mampu membuat stabil kualitas dan kesejahteraan petani lokal, kondisi ini membuat agenda peningkatan kesejahteraan petani perlu dievaluasi dan direvisi ulang demi mencapai tujuan sambil menjaga kesejahteraan petani.

Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah tujuan pembangunan, Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Riau dari 2010 – 2019 mengalami tren menurun dari tahun ke tahun, pada

tahun dasar 2010 jumlah penduduk miskin yakni sebanyak 558,00 ribu jiwa, dan pada tahun akhir 2019 sebanyak 490,72 ribu jiwa, atau dengan rata – rata penduduk miskin selama tahun 2010 hingga 2019 yaitu sebanyak 506,92 ribu jiwa.



Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun 2010 – 2019
 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2020

1.2. Perumusan Masalah

Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau cenderung mengalami penurunan, besarnya permanan sektor pertanian terhadap kontribusi PDRB dan penyerapan tenaga kerja menjadi pertanyaan terhadap kesejahteraan para petani di Provinsi Riau, berdasarkan masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perkembangan yang terjadi pada Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau dan komponen penyusunnya ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau ?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perkembangan yang terjadi pada Nilai Tukar Petani Provinsi Riau, dan faktor – faktor apa saja mempengaruhi terjadinya fluktuasi pada Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara lebih rinci berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dibuat beberapa lingkup tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau pada tahun.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau.

Adapun manfaat dan sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu ;

1. Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menanggapi dan mengevaluasi kembali terkait pembangunan pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Riau.
2. Bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi kedepannya.
3. Bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengabdian terhadap masyarakat.
4. Bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai bacaan guna menambah wawasan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan data *time series* Nilai Tukar Petani (NTP) yang ada di Provinsi Riau dari tahun 2003 – 2019 atas jumlah data yang diperoleh dan mencakup subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor peternakan dan subsektor perikanan (Agregat). Difokuskan untuk menganalisis perkembangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi Nilai Tukar Petani yang dicakup dalam pengolahan NTP di Provinsi Riau, analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Hasil pembangunan pertanian, selain dilihat dari data pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, juga diperlukan data pengukuran terhadap tingkat kesejahteraan petani, salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan rasio dari indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yang dimaksud dengan nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persentase, It merupakan suatu indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan, sedangkan Ib dari sisi kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun produksi.

Bila It atau Ib lebih besar dari 100, berarti It atau Ib lebih tinggi dibandingkan It atau Ib pada tahun dasar, secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi komoditas pertanian (Badan Pusat Statistik, 2019).

Sejak Desember 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun NTP menggunakan tahun dasar 2012 untuk subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan.

2.1.1. Arti Angka NTP

Secara umum ada tiga macam pengertian angka NTP (Badan Pusat Statistik, 2019) yaitu sebagai berikut :

1. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga komoditas pertanian naik lebih besar dari kenaikan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi.

2. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/break event point. Kenaikan/penurunan harga komoditas pertanian sama dengan kenaikan/penurunan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi.
3. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga komoditas pertanian relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi.

2.1.2. Kegunaan NTP

Adapun kegunaan dan manfaat yang bisa dilihat dari data NTP antara lain yaitu (Badan Pusat Statistik, 2019) :

1. Indeks harga yang diterima petani (It) dapat menggambarkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani, indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan Pendapatan Domestik Bruto (PDB)/Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian.
2. Pada kelompok indeks harga yang dibayar petani, indeks konsumsi rumah tangga menunjukkan fluktuasi harga barang/jasa yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di perdesaan dan dapat juga digunakan sebagai proxy inflasi perdesaan. Di sisi lain, indeks biaya produksi dan penambahan barang modal menunjukkan fluktuasi harga barang/jasa yang digunakan untuk memproduksi komoditas pertanian.
3. Nilai tukar petani mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi, Hal ini terlihat bila dibandingkan dengan kemampuan nilai tukarnya pada tahun dasar.

2.1.3. Ruang Lingkup NTP

Sektor pertanian yang dicakup dalam pengolahan NTP meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan, penghitungan NTP sejak tahun 2014 meliputi 10 kabupaten di provinsi Riau.

1. Subsektor tanaman bahan makanan (TBM) seperti padi dan palawija.
2. Subsektor hortikultura seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan.
3. Subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR) seperti kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan.
4. Subsektor peternakan seperti ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dan lain-lain), unggas (ayam, itik, dan lain-lain), dan hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dan lain-lain).
5. Subsektor perikanan baik perikanan laut maupun perikanan darat.

2.1.4. Konsep dan Definisi di dalam NTP

Berbagai konsep dan definisi yang dipergunakan dalam penghitungan NTP antara lain (Badan Pusat Statistik, 2019) :

1. **Petani** adalah orang yang mengusahakan/mengelola usaha pertanian atas resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap (sewa/kontrak/bagi hasil), orang yang bekerja di sawah atau ladang orang lain dengan mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani.
2. **Nilai Tukar Petani (NTP)** adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase (%). Secara konsep NTP menyatakan tingkat

kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian.

3. **Indeks Harga yang Diterima Petani (It)** adalah rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum ditambahkan biaya transportasi atau pengangkutan dan biaya pengepakan ke dalam harga penjualannya atau disebut *Farm Gate* harga di sawah atau ladang setelah pemetikan. Pengertian harga rata-rata adalah harga yang bila dikalikan dengan volume penjualan petani akan mencerminkan total uang yang diterima petani, data harga tersebut dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan petani produsen.
4. **Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)** adalah rata-rata harga eceran barang atau jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangganya sendiri maupun untuk keperluan proses produksi pertanian, data harga barang untuk keperluan produksi pertanian dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan petani, sedangkan harga barang atau jasa untuk keperluan konsumsi rumah tangga dicatat dari hasil wawancara langsung dengan pedagang atau penjual jasa di pasar terpilih.
5. **Pasar** adalah tempat terjadinya transaksi penjual dengan pembeli atau tempat yang biasanya terdapat penawaran dan permintaan, pada kecamatan yang sudah terpilih sebagai sampel pasar yang dicatat haruslah pasar yang cukup mewakili dengan syarat antara lain: paling besar, banyak penjual dan pembeli, jenis barang yang diperjual belikan cukup banyak dan terjamin kelangsungan pencatatan harganya, serta terletak di desa perdesaan (rural).

6. **Harga eceran perdesaan** adalah harga transaksi antara penjual dan pembeli secara eceran di pasar setempat untuk tiap jenis barang yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual kepada pihak lain, harga yang dicatat adalah harga modus (yang terbanyak muncul) atau harga rata-rata biasa dari beberapa pedagang/penjual yang memberikan datanya.

Formula yang digunakan pada penghitungan indeks harga yang diterima petani (It) dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) adalah formula Indeks Laspeyres yang dikembangkan (Modified Laspeyres Indexes). yaitu :

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^K \frac{P_m}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} \times Q_{oi}}{\sum_{i=1}^K P_{oi} \times Q_{oi}} \times 100 \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- In = Indeks harga bulan ke-n (It maupun Ib)
- Pni = Harga bulan ke-n untuk jenis barang ke-i
- P(n-1) i = Harga bulan ke-(n-1) untuk jenis barang ke-i
- Pni/P(n-1)/ i = Relatif harga bulan ke-n untuk jenis barang ke-i
- Poi = Harga pada tahun dasar. untuk jenis barang ke-i
- Qoi = Kuantitas pada tahun dasar. untuk jenis barang ke-i
- K = Banyaknya jenis barang/jasa yang tercakup dalam paket Komoditas

Pertimbangan yang mendasari digunakannya formula tersebut. yaitu adalah sebagai berikut :

1. Tren harga tidak dipengaruhi oleh perbedaan kuantitas atau spesifikasi komoditas.
2. Perbedaan harga komoditas antar kabupaten tidak berpengaruh.
3. Dapat dilakukan penggantian spesifikasi atau penggantian jenis komoditas.

Formula yang digunakan dalam perhitungan besaran Nilai Tukar Petani

(NTP) yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). yaitu :

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

NTP = Nilai Tukar Petani

I_t = Indeks harga yang diterima petani

I_b = Indeks harga yang dibayar petani

2.1.5. Penyebab Lemahnya NTP

(Tulus, 2003) Perubahan NTP disebabkan oleh perubahan IT dan/atau IB, oleh karena itu pengkajian terhadap penyebab lemahnya NTP dapat dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya IT dan faktor-faktor penyebab tingginya IB, faktor-faktor tersebut dapat berbeda menurut jenis komoditi, misalnya dari sisi IT jelas beras dan jeruk berbeda dalam pola persaingannya. Di Indonesia, petani beras mengalami persaingan yang sangat ketat dengan beras impor, karena beras merupakan makanan pokok masyarakat yang artinya selalu ada permintaan dalam jumlah yang besar, maka semua petani berusaha untuk menanam padi atau memproduksi beras saja, hal ini membuat harga beras dipasar domestik cenderung menurun hingga pada titik ekuilibrium jangka panjang sama dengan biaya merjinal, atau sama dengan biaya rata-rata per unit output.

Sedangkan dari sisi IB, faktor utama adalah harga pupuk, yang bagi banyak petani padi terlalu mahal, hal ini tidak terlalu disebabkan oleh volume produksi atau suplai pupuk (termasuk pupuk impor) di dalam negeri yang terbatas, tetapi oleh adanya distorsi di dalam sistem pendistribusiannya, harga pupuk yang mahal bisa

juga merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mengalihkan surplus di sektor pertanian ke sektor industri.

Dalam perkataan lain, NTP dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dari hasil bertaninya, berarti apabila inflasi tinggi atau harga-harga dari bahan-bahan pokok mengalami peningkatan, di satu sisi bisa menguntungkan petani selama kenaikan tersebut untuk bahan-bahan makanan dan bersumber dari petani, sementara biaya produksi tetap tidak berubah. Akan tetapi di sisi lain inflasi bisa juga berarti kerugian bagi petani apabila kenaikan harga dari bahan-bahan makanan lebih disebabkan oleh distorsi dalam sistem pendistribusiannya ke pasar.

2.2. Kesejahteraan

Unsur kesejahteraan hidup juga dapat dijadikan dua kategori yaitu objektif dan subjektif, kesejahteraan hidup objektif merupakan keperluan hidup yang dapat dicapai oleh individu dan dapat dilihat secara luaran seperti pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan kesejahteraan hidup subjektif dinilai berdasarkan kepuasan dan nikmat hidup yang dirasakan oleh individu seperti merasa senang dan bersyukur karena mempunyai pekerjaan yang baik, anak – anak yang sukses dan mempunyai keluarga yang bahagia (Norizan, 2003).

(Myers, 2005) juga berpendapat bahwa kesejahteraan hidup merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur (subjektif), sehingga sangat sulit untuk menafsirkan maksud dari kesejahteraan hidup tersebut, hal ini karena kesejahteraan hidup merupakan cara hidup dalam mencapai tahap kesehatan dan kesejahteraan diri yang optimal meliputi fisik, mental, dan spiritual yang diintegrasikan oleh individu untuk kehidupan yang berkualitas di dalam masyarakat, konsep kesejahteraan dapat

dilihat dari berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Inti dari konsep kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya setiap aspek hidup manusia baik moral maupun materil.

Dalam pasal 1 yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Konsep kesejahteraan dapat dijelaskan dalam sebuah model yaitu NESP (*Nested Spheres of Poverty*) (CIFOR, 2007), model ini menjelaskan bahwa kesejahteraan dipengaruhi oleh berbagai lingkungan beserta aspek kehidupan yang ada didalamnya.

2.2.1. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya :

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”

berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut. Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek

materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki),

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah.

2.2.2. Indikator Kesejahteraan

BPS menyatakan untuk mengetahui kesejahteraan seseorang, maka ada 7 hal yang mengindikasikan, antara lain kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola pengeluaran, perumahan dan lingkungan serta sosial dan budaya (BPS, 2006).

Penjabaran indikator tingkat kesejahteraan menurut (BPS, 2006) yaitu sebagai berikut :

1. Kependudukan

Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam penanganan masalah kependudukan, pemerintah tidak hanya mengarahkan upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, program pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

2. Kesehatan dan Gizi

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dengan menggunakan indikator

utama angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu, aspek lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Faktor kemiskinan merupakan faktor yang menyebabkan belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, karena itu dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan sejahtera.

4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

5. Taraf dan Pola Pengeluaran

Jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan di antara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah dicapai walaupun mendekati dengan pengeluaran.

6. Perumahan dan lingkungan

Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan bagi pemiliknya, semakin baik fasilitas yang dimiliki maka dapat diasumsikan semakin

sejahtera rumah tangga yang mendiami rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan antara lain luas lantai tanah, sumber air minum, fasilitas buang air besar rumah tangga, dan tempat penampungan kotoran akhir (jamban).

2.3. Teori Pembangunan Pertanian

Tujuan pembangunan pertanian di Indonesia tahun 2015 – 2019 adalah untuk mencapai (1) meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan (2) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian (3) meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi (4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Kementrian Pertanian, 2019).

(Kementrian Pertanian 2019), mengemukakan bahwa kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan produksi komoditas strategis hampir mencakup seluruh simpul sistem berproduksi, seperti kendala keseragaman mengadopsi teknologi, keterbatasan modal kerja, kurangnya pengawalan di lapangan, hingga kendala pemasaran produk hasil usahatani. Keseluruhan kendala internal ini masih ditambah lagi oleh persoalan beradaptasi terhadap perubahan iklim global.

Permasalahan ini mencakup kondisi: (1) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tani terhadap penerapan inovasi dan teknologi budidaya; (2) kurang memadainya fasilitas infrastruktur pertanian, khususnya kerusakan jaringan irigasi dengan sebagian lahan kekurangan pasokan air; (3) kecilnya peran lembaga keuangan petani dan tidak tersedianya modal usahatani yang cukup untuk menyediakan input usahatani. terutama kesulitan mengakses modal, keterbatasan menyediakan tenaga kerja, dan kurangnya alsintan terapan; (4) kurang intensifnya

penyuluhan dan pengawalan usahatani di lapangan, termasuk dalam kaitan perlindungan usahatani; dan (5) lemahnya kelembagaan petani yang mengakibatkan rendahnya posisi tawar petani, khususnya karena informasi harga yang asimetrik dan ketidakberdayaan manajemen pemasaran dalam transaksi jualbeli padakomoditas padi, jagung, cabai, bawang merah, dan sapi potong.

Dalam upaya mencapai tujuan dan mengatasi permasalahan pembangunan pertanian, pemerintah membuat prioritas dan arah kebijakan untuk mendukung pembangunan pertanian di Indonesia yang dikembangkan oleh “Kementerian Pertanian”. Dalam menjalankan tugasnya Kementerian Pertanian membuat suatu strategi kebijakan yaitu : (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit (4) Penguatan kelembagaan petani (5) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi (7) Penguatan jaringan pasar (8) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian (9) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi (Kementrian Pertanian. 2019).

A. T. Mosher atas dasar pengalamannya menggeluti masalah pertanian menyimpulkan bahwa ada 5 (lima) syarat pokok untuk membangun sektor pertanian (Hanafie, 2010), yaitu (1) adanya pasar untuk hasil-hasil pertanian, (2) teknologi yang senantiasa berubah lebih maju, (3) sarana produksi dan alat-alat pertanian yang tersedia secara local, (4) insentif produksi untuk petani, dan (5) tersedianya transportasi untuk mendistribusikan hasil-hasil pertanian.

Di samping kelima syarat mutlak tersebut, Mosher juga mengemukakan syarat yang akan mempercepat dan memperlancar usaha pembangunan pertanian

(Hanafie. 2010), yaitu (1) pendidikan untuk pembangunan, (2) kredit produksi, (3) kegiatan kelompok untuk petani, (4) penyempurnaan dan perluasan lahan pertanian, dan (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian.

2.4. Teori Kebijakan Pertanian

Kebijakan pertanian merupakan serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam mendukung usaha pembangunan pertanian. Mubyarto (1989) dalam buku karyanya “Pengantar Ekonomi Pertanian” mengemukakan kebijakan pertanian yang lebih spesifik, meliputi (1) kebijakan harga, (2) kebijakan pemasaran, dan (3) kebijakan struktural. Sementara itu Hanafie (2010) dalam buku karyanya “Pengantar Ekonomi Pertanian” mengemukakan kebijakan pertanian, meliputi (1) kebijakan produksi, (2) kebijakan subsidi, (3) kebijakan investasi, (4) kebijakan harga, (5) kebijakan pemasaran, dan (6) kebijakan konsumsi.

2.4.1. Kebijakan Produksi

Pangan merupakan suatu komoditi yang menyangkut kesejahteraan dan kelangsungan hidup suatu bangsa karena merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling pokok. Melihat peranan pangan yang sangat penting, pemerintah selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional, tidak saja dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitas. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan guna mencegah terjadinya kerawanan pangan, yaitu dengan peningkatan produksi untuk mencapai swasembada pangan.

Untuk menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pangan pemerintah menetapkan serangkaian kebijakan, antara lain (1) kebijakan perbenihan, (2) sarana produksi, pupuk, dan pestisida, (3) kebijakan perkreditan,

(4) kebijakan pengairan, (5) kebijakan diversifikasi usaha tani, (6) kebijakan penyuluhan, (7) kebijakan harga input dan output, dan (8) kebijakan penanganan pascapanen (Hanafie, 2010).

2.4.2. Kebijakan Subsidi

Kebijakan subsidi bertujuan untuk menjaga harga dalam negeri supaya lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatan suatu komoditi atau harga internasionalnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membuat 2 (dua) kebijakan (Hanafie, 2010), yaitu :

1. Subsidi harga produksi

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dalam negeri, artinya konsumen dalam negeri dapat membeli barang yang harganya lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatan suatu komoditi atau harga internasionalnya. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan subsidi harga faktor produksi, sehingga biaya proses produksi sektor pertanian relatif rendah yang akan berpengaruh pada harga jual produk pertanian yang terjangkau oleh konsumen.

2. Subsidi harga faktor produksi

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dan dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negeri. Kebijakan ini dapat berupa subsidi pupuk, subsidi biaya angkut faktor produksi ke daerah pelosok, dan perbedaan tingkat bunga bank dalam pengambilan kredit.

2.4.3. Kebijakan Investasi

Kebijakan investasi bertujuan untuk merangsang investasi, baik oleh swasta nasional (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun swasta asing (Penanaman Modal Asing). Sampai saat ini investasi pada sektor pertanian masih relatif kecil,

hal ini terutama disebabkan oleh faktor keuntungan yang dapat diperoleh yang umumnya lebih kecil dibandingkan investasi di sektor industri dan jasa.

Untuk menarik minat investor pemerintah memberikan berbagai fasilitas kepada para investor yang menanamkan modalnya di sektor pertanian, seperti pembebasan pajak impor untuk alat-alat dan mesin-mesin pertanian dan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (Hanafie, 2010).

2.4.4. Kebijakan Harga

Kebijakan harga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga komoditi pertanian sehingga pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Kebijakan harga dapat mengandung pemberian suatu penyangga atas harga komoditi pertanian supaya tidak terlalu rendah pada saat musim panen raya agar tidak terlalu merugikan petani atau langsung memberikan subsidi tertentu secara langsung kepada petani.

Secara umum kebijakan harga bertujuan untuk mencapai (1) kontribusi terhadap anggaran pemerintah, (2) pertumbuhan devisa negara, (3) mengurangi ketidakstabilan harga, (4) memperbaiki distribusi pemasaran dan alokasi sumber daya alam, (5) memberikan arah produksi, serta meningkatkan taraf swasembada pangan dan (6) meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan penduduk (Hanafie. 2010).

Penerapan dari kebijakan harga dapat berupa subsidi sarana produksi, kondisi ini dapat terjadi karena harga sarana produksi pertanian masih relatif mahal, misalnya subsidi pupuk, pestisida dan lain-lain.

Kebijakan lain berupa peraturan pemerintah yang mengatur terkait harga dasar/harga lantai (floor price) dan harga tertinggi/harga atap (ceiling price) pada

komoditi pertanian. Harga dasar bertujuan untuk menjaga agar harga pasar pada saat panen raya tidak terlalu rendah dari yang seharusnya diterima oleh produsen dan diupayakan agar harga pasar minimal sama dengan harga dasar sehingga tidak merugikan petani. Akan tetapi dengan diberlakukannya kebijakan tersebut pemerintah harus membeli kelebihan produksi (excess supply) yang dihasilkan petani (Soekartawi, 2002).

Sementara itu, harga atap diperlukan khususnya pada saat musim paceklik dimana pada saat itu persediaan produksi sangat terbatas, dalam kondisi tersebut biasanya harga akan cenderung tinggi, sehingga diperlukan kebijakan harga maksimum untuk melindungi konsumen, pemerintah harus menjual stock (persediaan atau cadangan) komoditi pertanian yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara melakukan operasi pasar.

2.4.5. Kebijakan Pemasaran

Kebijakan pemasaran bertujuan untuk mengatur distribusi barang antar daerah dan antar waktu sehingga di antara harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir dan harga yang diterima oleh produsen terdapat margin pemasaran dalam jumlah tertentu sehingga dapat merangsang proses produksi pertanian dan proses pemasaran (Hanafie, 2010).

Untuk memperlancar pemasaran hasil-hasil pertanian pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, antara lain menetapkan rantai pemasaran yang sependek mungkin, membentuk kantor pemasaran bersama, serta menunjuk distributor dan pengecer tertentu untuk komoditi tertentu pula. Untuk memperlancar aliran barang dari daerah surplus ke daerah defisit pemerintah memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) yang berbeda, HET di daerah defisit

lebih tinggi daripada HET di daerah surplus, perbedaan HET tersebut bertujuan untuk merangsang aktivitas perdagangan antar daerah (Hanafie. 2010).

2.4.6. Kebijakan Konsumsi

Kebijakan pangan tidak hanya menyangkut masalah produksi, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan distribusinya secara agregat, terpenuhinya pangan secara kuantitas dan kualitas merupakan hal yang sangat penting sebagai landasan pembangunan sumber daya manusia. Konsumsi masyarakat Indonesia sebagian besar karbohidratnya di-supply dari beras, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pangan beras, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memengaruhi pola konsumsi masyarakat berupa Inpres Nomor 20/1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Masyarakat yang berdimensikan permintaan terhadap keanekaragaman pangan (Hanafie, 2010). Pengetahuan terhadap keanekaragaman pangan merupakan hal penting berdasarkan beberapa alasan :

1. Pengurangan konsumsi beras akan memberikan dampak positif terhadap kelestarian swasembada atau ketahanan pangan.
2. Diversifikasi konsumsi akan mengubah alokasi sumber daya ke arah yang lebih efisien, fleksibel, dan stabil.
3. Keanekaragaman pangan juga penting dilihat dari segi nutrisi.
4. Pengetahuan tentang keanekaragaman pangan akan bermanfaat dalam perumusan strategi pengembangan sistem pangan.

2.4.7. Kebijakan Struktural

Kebijakan struktural dalam pembangunan sektor pertanian bertujuan untuk memperbaiki struktur produksi, misalnya luas pemilikan lahan, pengenalan teknologi dan pengusaha alat-alat pertanian baru, dan perbaikan prasarana

pertanian umumnya baik prasarana fisik maupun prasarana sosial ekonomi pertanian, kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan baik jika ada kerjasama yang erat antar lembaga-lembaga pemerintahan dikarenakan perubahan struktural membutuhkan waktu yang lama (Mubyarto, 1989).

2.5. Regresi Linier Berganda

Menurut Widarjono (2007) analisis regresi merupakan analisis yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dan berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistic, bukan hubungan yang pasti. Dalam statistika hubungan yang tidak pasti ini disebut hubungan yang acak (*random*) atau stokastik (*stochastic*), hubungan ini mencerminkan perilaku ekonomi. Sementara itu hubungan di dalam persamaan matematika menjelaskan hubungan yang pasti (*deterministic*) antara variabel yang satu dengan variabel lain. Regresi menunjukkan hubungan satu arah yakni dari variabel independen ke variabel dependen. Sedangkan kasualitas menunjukkan hubungan dua arah.

2.5.1. Metode Kuadrat Terkecil Pada Regresi Linier Berganda

Menurut Widarjono (2007), analisis linier berganda adalah di mana variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan. Bentuk umum persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_kX_k + e \dots\dots\dots(3)$$

1. Uji T test (Uji Koefisien Regresi Secara Parsial)

Menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji terhadap nilai statistik t merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya.

Formulasi hipotesis :

- a. $H_0 : b_i = 0$
- b. H_0 : paling tidak, ada satu $b_i \neq 0$

2. Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian :

- a. $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya semua variabel independen (X) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen (Y) dan persamaan tersebut tidak dapat diterima sebagai penduga.
- b. $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya semua variabel independen (X) secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) dan persamaan tersebut dapat diterima sebagai penduga.

3. Uji R^2 adjusted (R^2)

Menurut Widarjono (2007) koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya ialah untuk menentukan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R^2 juga dapat didefinisikan sebagai proporsi dari total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh garis (variabel independen X). Nilai

koefisien determinasi R^2 terletak antara angka 0 dan 1. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka mempunyai garis regresi yang kurang baik.

2.5.2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang memenuhi criteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) adalah yang tidak terdapat heteroskedastis, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi (Sudrajat, 1988), maka pengujian yang dilakukan yaitu :

1. Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atautakah tidak.

2. Heteroskedastisitas

Uji deteksi heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda. Hubungan linier antara variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna (*perfect*) dan hubungan linier tidak sempurna (*imperfect*). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi bebas antar variabel bebas.

4. Autokorelasi

Autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model digunakan kriteria lain untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Santoso, 2000) :

1. Jika nilai $DW < -2$, maka ada autokorelasi positif
2. Jika $-2 \leq DW \leq 2$, maka tidak ada autokorelasi
3. Jika nilai $DW > 2$, maka ada autokorelasi negative

2.6. Penelitian Terdahulu

Fita Febriana, dkk (2015) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Di Provinsi Jawa Timur" tahun 2008 - 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Perkembangan nilai tukar petani di Provinsi Jawa Timur (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai tukar petani di Provinsi Jawa Timur. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan Harga dasar gabah (HDG), Produktivitas (PDV), dan Upah Kerja (UK) berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani di Provinsi Jawa Timur. Rata-rata NTP Provinsi Jawa Timur tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011, kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar petani produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun

2012 secara umum masih lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2011. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pergerakan dan perkembangan NTP Provinsi Jawa Timur adalah variabel harga dasar gabah dan produktivitas petani dalam memberikan tingkat produksinya.

Muhammad Ilham Riyadh (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis Nilai Tukar Petani Komoditas Tanaman Pangan Di Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) struktur biaya dan analisis usaha tani tanaman pangan, (2) struktur pengeluaran rumah tangga petani tanaman pangan, (3) dinamika Nilai Tukar Rumah Tangga Petani agregat Sumatera Utara (dan komponen penyusunannya) dan nilai tukar komoditas wilayah di enam kabupaten, (4) dekomposisi nilai tukar komoditas tanaman pangan terhadap konsumsi dan biaya produksi serta faktor penyusunannya, dan (5) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi nilai tukar petani komoditas tanaman pangan di Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Analisis yang digunakan adalah perhitungan NTP.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi NTP di Sumatera Utara adalah produktivitas hasil, luas lahan, biaya tenaga kerja, harga komoditas, dan harga pupuk yang secara parsial maupun serempak berpengaruh nyata terhadap NTP.

Arlia Renaswari Nirmala dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang tahun 2013 – 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perkembangan posisi NTP Padi dan Nilai Tukar Petani komoditas pangan lain di Indonesia (2) Penghitungan NTP Padi dan menganalisis faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap NTP Padi. Analisis yang digunakan yaitu ratio harga laspeyres antara harga yang diterima terhadap yang dibayar petani.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Nilai Tukar Petani dari tahun 2013 - 2015 beragam tingkatannya, pada tahun 2013 nilai tukar petani diatas 100 persen sehingga petani tanaman pangan pada tahun tersebut berada dalam kondisi sejahtera. Sebaliknya pada tahun 2014 nilai tukar petani berada dalam keadaan defisit sehingga pada tahun tersebut terlihat kesejahteraan petani tanaman pangan mengalami penurunan atau kurang sejahtera. Tahun 2015 nilai tukar petani naik dari kondisi sebelumnya yaitu menyamai batas kesejahteraan yaitu 100% sehingga berada dalam kondisi cukup sejahtera. Harga jual produk dan harga pupuk berpengaruh nyata terhadap nilai tukar petani pangan, sedangkan produksi, luas lahan, dan pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap nilai tukar petani. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi luas lahan usahatani yang dimiliki maka pengeluaran untuk faktor produksi juga akan semakin tinggi, demikian pula produksi dan pestisida menambah pengeluaran usahatani sehingga indeks harga yang dibayarkan melebihi indeks harga yang diterima.

Muhammad R. Ipango (2017) melakukan penelitian dengan judul Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) Di Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini untuk dampak kenaikan BBM terhadap Nilai Tukar Petani (NTP). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) secara keseluruhan yaitu dengan meningkatnya biaya konsumsi

rumah tangga, biaya produksi hasil pertanian, biaya transportasi, dan biaya pengangkutan.

Finisuda Anding Istiana (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani di Indonesia Tahun 2013-2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Perilaku Nilai Tukar Petani (NTP) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani di Indonesia (2) Pengaruh secara signifikan variabel produktivitas terhadap variabel Nilai Tukar Petani (NTP) (3) Pengaruh secara signifikan variabel PDRB total terhadap variabel Nilai Tukar Petani (NTP) (4) Pengaruh secara signifikan variabel IHK total terhadap variabel Nilai Tukar Petani (NTP). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menyimpulkan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Nilai Tukar Petani, ketahanan pangan nasional dari tahun 2013 sampai 2017 semakin menurun hal ini disebabkan karena produktivitas pertanian tanaman pangan rendah, produktivitas pertanian berpengaruh positif terhadap kesejahteraan petani, yaitu apabila produktivitas naik maka kesejahteraan petani akan naik, dan sebaliknya apabila produktivitas turun maka kesejahteraan petani rendah. Penurunan produktivitas pertanian tanaman pangan disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan produktif pertanian, sehingga para petani kesulitan dalam memproduksi hasil-hasil pertanian secara maksimal. NTP yang rendah disebabkan karena adanya inflasi yang tinggi di daerah pedesaan yang mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, Inflasi yang tinggi menyebabkan harga-harga barang hasil produksi pertanian menjadi mahal, apabila harga-harga tersebut

naik maka banyak masyarakat yang enggan untuk berbelanja hasil-hasil produksi pertanian, pada akhirnya para petani rugi dan kesejahteraan petani rendah.

Muhammad Zul Mazwan dan Masyhuri (2018) melakukan penelitian berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tebu Plasma PTPN XI. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis nilai tukar petani tebu plasma PTPN XI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis yang digunakan adalah analisis subsisten dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian faktor-faktor yang meningkatkan nilai tukar petani lahan sawah yaitu produktivitas tebu, luas lahan dan rendemen tebu. Sedangkan pada lahan tegalan yaitu luas lahan dan rendemen tebu. Adapun faktor-faktor yang menurunkan nilai tukar petani tebu lahan sawah yaitu pengalaman petani, harga bibit, harga pupuk anorganik dan upah tenaga kerja. Sedangkan pada lahan tegalan yaitu jumlah anggota keluarga dan upah tenaga kerja. Pemerintah perlu menaikkan Harga Eceran Tertinggi gula. Program pemerintah untuk mendukung insentif fasilitas produksi diperlukan untuk menurunkan biaya produksi tebu dalam memberikan motivasi untuk meningkatkan NTP. Upaya intensifikasi input juga perlu dilakukan dengan menambahkan input produksi yang mampu meningkatkan NTP.

Suci Jamilah dkk (2018) melakukan penelitian berjudul Analisis Faktor-Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Ekonomi Rumah tangga Petani Padi Sawah Di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi ekonomi rumah tangga petani padi sawah yang meliputi produksi, alokasi waktu kerja

pendapatan dan pengeluaran di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Analisis yang digunakan adalah metode *Two Stage Least Square* (2 SLS).

Hasil penelitian menyimpulkan temuan utama dari penelitian adalah: faktor-faktor dominan yang mempengaruhi aspek produksi adalah luas panen padi sawah dan biaya sarana produksi. Aspek alokasi waktu kerja meliputi: Pertama, alokasi waktu kerja dalam usahatani padi sawah dipengaruhi alokasi waktu kerja luar usahatani padi dan angkatan kerja rumahtanga. Kedua, penggunaan tenaga kerja luar keluarga dipengaruhi pendapatan di dalam usahatani padi sawah. Ketiga, alokasi waktu kerja luar usahatani padi sawah dipengaruhi pendapatan di luar usahatani padi sawah, alokasi kerja dalam usahatani padi sawah, pengalaman kerja petani dan umur petani. Aspek pendapatan di luar usahatani padi sawah dipengaruhi alokasi waktu kerja luar usahatani padi sawah. Aspek pengeluaran meliputi: Pertama, pengeluaran konsumsi pangan dipengaruhi oleh pendapatan total, jumlah anggota keluarga dan pengeluaran kesehatan. Kedua, pengeluaran konsumsi non pangan dipengaruhi pendapatan total. Ketiga, investasi pendidikan dipengaruhi pendapatan total dan jumlah anak sekolah. Keempat, investasi pada usahatani padi sawah dipengaruhi pendapatan total, luas panen padi sawah dan konsumsi pangan. Kelima, pengeluaran rekreasi dipengaruhi pendapatan total, konsumsi total, investasi pendidikan dan tabungan. Keenam, tabungan dipengaruhi pendapatan total, konsumsi total, investasi pendidikan dan pengeluaran kesehatan.

Khusnus Fikri Kurniawan (2019) melakukan penelitian berjudul Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis (1) Karakteristik dan Petani dan Profil Usahatani (2) Nilai Tukar Petani Sayuran (3)

Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap Nilai Tukar Petani sebagai indikator kesejahteraan petani. Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

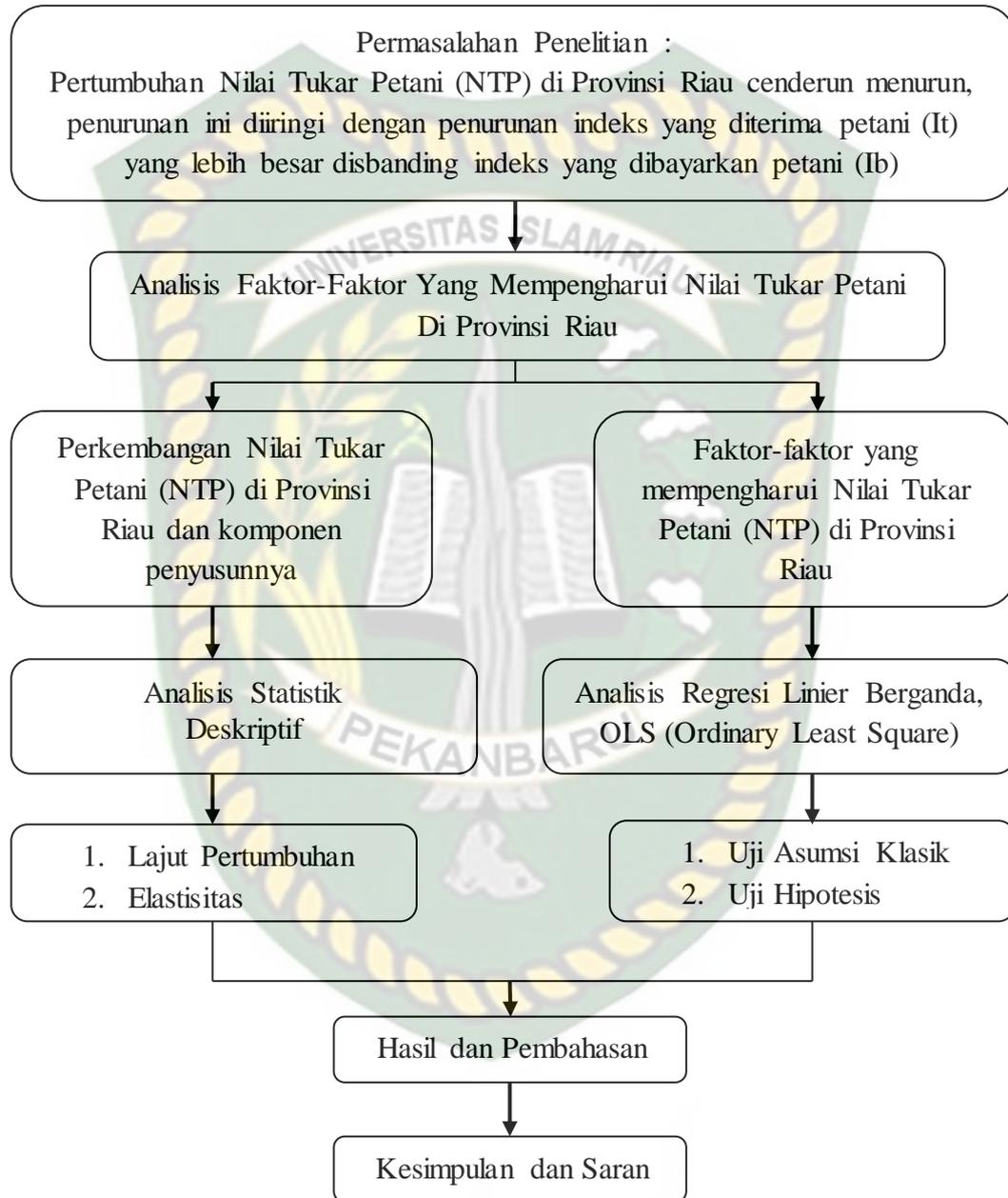
Hasil penelitian menyimpulkan terdapat 8 faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani sayuran di Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru dengan taraf nyata 5%, yaitu produktivitas (X1) umur (X2) harga benih (X5) biaya pupuk (X6) biaya pestisida (X7) harga jual sayuran (X8) pengeluaran pangan (X9) dan pengeluaran non pangan (X10). Sedangkan pendidikan (X3) dan jumlah tanggungan keluarga (X4) tidak berpengaruh nyata terhadap Nilai Tukar Petani sayuran di Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

Chritoporus dkk (2020) melakukan penelitian berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Dan Hubungannya Dengan Angka Harapan Hidup Di Sulawesi Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis (1) Kesejahteraan petani di Sulawesi Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (2) Hubungan nilai tukar petani dengan angka harapan hidup sebagai indikator kesehatan petani di Sulawesi Tengah. Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menyimpulkan analisis deskriptif menunjukkan bahwa petani di Sulawesi Tengah tidak sejahtera, produksi komoditi, harga komoditi produk, dan harga pupuk berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani. Luas lahan, produksi komoditas, dan harga komoditas produk memiliki hubungan positif, sedangkan harga pupuk dan pestisida memiliki hubungan yang negatif. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan hubungan yang positif antara nilai tukar petani dan angka harapan hidup.

2.7. Kerangka Pemikiran

Hal ini lebih jelasnya dapat dilihat pada alur kerangka pemikiran penelitian yang disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Alur Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan Gambar 4 dapat dijelaskan menyangkut permasalahan tidak seimbang nya pertumbuhan Nilai Tika Petani (NTP) dengan pertumbuhan PDRB

sektor pertanian. Berawal dari masalah tersebut adapun judul penelitian ini adalah Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Di Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani di provinsi riau.

Adapun analisis untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah (1) analisis statistik deskriptif (2) analisis regresi linier berganda, OLS (*Ordinary Least Square*). Maka didapat hasil dari masing-masing tujuan adalah (1) perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau selama 21 tahun (2) terdapat pengaruh signifikan atau tidak signifikan antara variabel bebas (produksi, inflasi, upah buruh tani, harga pupuk, dan harga BBM) terhadap variabel tidak bebas yaitu Nilai Tukar Petani (NTP).

Setelah dilakukan analisis terhadap variabel-variabel yang diukur, akan didapat kesimpulan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang termasuk didalam variabel yang telah ditentukan atau tidak. Selanjutnya didapat saran yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Riau menyangkut kesejahteraan petani di Provinsi Riau.

2.8. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Produksi berpengaruh positif terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau.
2. Inflasi, upah buruh tani, harga pupuk dan harga BBM berpengaruh negatif terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode, Tempat, dan Waktu Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri literature serta menelaah studi yang ada pada perpustakaan maupun instansi atau lembaga pemerintahan yang terkait dengan penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Provinsi Riau, yang mencakup seluruh sub sektor pertanian yang ada yaitu sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan. Penelitian ini dilaksanakan selama tujuh bulan, di mulai dari bulan Agustus 2020 hingga Februari 2021, yang meliputi tahap kegiatan yaitu: tahap persiapan (penyusunan usulan penelitian, seminar proposal, dan perbaikan), tahapan pelaksanaan penelitian (pengumpulan data, tabulasi data dan analisis data) dan tahapan penyusunan laporan penelitian (seminar hasil, perbaikan, dan perbanyakan skripsi).

3.2. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik dataset statistik, teknik dataset statisik ini merupakan jenis teknik penelitian kuantitatif yang menggunakan data tersedia dari pihak-pihak instansi tertentu. Dataset yang digunakan sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas, dataset hasil survey lembaga lain terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan bersifat *time series* dalam kurun waktu tahun 2003 hingga 2019. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah data sekunder, data yang digunakan bersumber dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, Kementerian Pertanian Indonesia, dan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

Tabel 4. Sumber Data Penelitian

No	Jenis Data	Sumber
1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia & Provinsi Riau (Persen/Tahun) 2014 - 2018	BPS
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian (Juta Rupiah) Provinsi Riau 2015 - 2019	BPS
3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2018 - Agustus 2019 Provinsi Riau	BPS
4	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun (Ribuan Jiwa) 2010 - 2019	BPS
5	Indeks Yang Diterima Petani (It) dan Indeks Yang Dibayar Petani (Ib) Provinsi Riau (Indeks) 1999 - 2019	BPS
6	Nilai Tukar Petani (Indeks) 1999 - 2019	BPS
7	Produksi Sektor Pertanian (Ton/Tahun) 1999 - 2019	BPS
8	Inflasi (Persen/Tahun) 1999 - 2019	BPS
9	Rata-Rata Upah Buruh Tani (Rp/Hari) 1999 - 2019	BPS
10	Rata-Rata Harga Pupuk Subsidi (Rp/Kg) 1999 - 2019	Kementerian Pertanian
11	BBM (Rp/Liter) 1999 - 2019	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

3.4. Konsep Operasional

Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Petani (NTP), merupakan angka indeks perbandingan antara indeks yang dibayarkan petani (It) dan indeks yang diterima petani (Ib). Atau dengan kata lain indeks NTP merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar

kemampuan petani mencukupi kebutuhannya dari perbandingan biaya produksi dan pendapatan yang diterimanya.

2. Produksi sektor pertanian, merupakan produksi tahunan dari kelima subsektor pertanian yang mencakup Provinsi Riau yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Data ini dikonversi menjadi satuan ton/tahun, dan digabungkan menjadi satu indikator yakni produksi sektor pertanian
3. Inflasi, merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Data kenaikan harga barang dan jasa secara umum di kota Pekanbaru. data yang digunakan adalah data inflasi tahun berjalan.
4. Upah buruh tani, adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan/pekerjaan di sawah atau ladang pertanian dengan tidak menanggung resiko terhadap hasil panen dan bertujuan mendapatkan upah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata upah buruh tani Provinsi Riau.
5. Harga pupuk, adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang dibutuhkan tanaman sehingga mampu berproduksi secara maksimal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Indonesia, rata-rata harga pupuk dihitung dengan mencari nilai rata-rata harga (*Average*) subsidi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, dan pupuk NPK.
6. Harga BBM, merupakan kebutuhan dasar sumber energi dalam mengoperasikan kendaraan, peralatan, dll. Tak terkecuali peralatan pertanian (alsintan) yang

menggunakan bahan bakar sebagai energi penggerakannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga bahan bakar premium nasional.

3.5. Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode laju pertumbuhan ekonomi dan elastisitas dengan rumus :

1. Laju Pertumbuhan

Pengujian ini ditujukan untuk mengukur, melihat, dan membandingkan perubahan maupun pertumbuhan Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau dengan menggunakan rumus ;

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100 \dots\dots\dots(4)$$

Atau,

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{NTP_t - NTP_{t-1}}{NTP_{t-1}} \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan :

- NTP_t = NTP Pada Periode ke t
- NTP_{t-1} = NTP Pada Periode ke t Sebelumnya

2. Elastisitas

Pengujian elastisitas ini dimaksudkan untuk menguji perubahan variabel independen terhadap variabel independen melalui hasil estimasi persamaan regresi.

Rumusnya :

$$Ed = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} \text{ atau, } E = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \times \text{Koefisien} \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan

E_d = Elastisitas Permintaan Titik

ΔQ = Perubahan Kuantitas

ΔY = Perubahan Harga

3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh antara nilai tukar petani dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu produksi pertanian, inflasi, upah buruh tani, harga pupuk dan harga BBM. Sehingga menurut persamaan ekonometrika model yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon \dots\dots\dots(7)$$

Parameter dugaan ialah sebagai berikut : $\beta_0, \beta_1 > 0$ dan $\beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5 < 0$

Keterangan :

Y : Nilai Tukar Petani (Indeks)

β_0 : Intercept

X_1 : Produksi (Ton/Tahun)

X_2 : Inflasi (%/Tahun)

X_3 : Upah Buruh Tani (Rp/Hari/Orang)

X_4 : Harga Pupuk (Rp/Kg)

X_5 : Harga BBM (Rp/Liter)

ε : Error

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program Eviews versi 10. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan ekonometrika dalam persamaan regresi dengan metode estimasi adalah metode kuadrat terkecil atau OLS (*Ordinary Least Square*) yaitu proses matematis

untuk menentukan intersep dan slope garis yang paling tepat untuk menghasilkan jumlah kuadrat deviasi atau simpangan minimum.

Metode yang digunakan ini akan menghasilkan dugaan yang terbaik, linear, dan memiliki varians yang minimum dalam kelas sebuah dugaan tanpa bias (*Best Linear Unbiased Estimator/BLUE*). Hasil koefisien-koefisien regresi yang diperoleh dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) agar bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), maka ada beberapa asumsi persamaan regresi linier klasik yang harus diuji, yaitu : Normalitas, Heteroskedaitas, Multikolinearitas, dan Autokorelasi.

A. Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat kenormalan variabel pengganggu. Melalui Jarque-Berra test, kriteria pengujianya adalah menghitung nilai Probabilitas. Apabila nilai JB hitung < nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas J -Bhitung > nilai probabilitas $\alpha = 5$ persen maka residualnya berdistribusi normal.

2. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual (kesalahan pengganggu) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varians residual (kesalahan pengganggu) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas (sama variannya). Pada penelitian ini uji yang akan digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah uji Breusch-Pagan-Godfrey, uji ini mengembangkan model yang tidak memerlukan penghilangan data c (coefficient) dan pengurutan data. Adapun kriteria keputusannya sebagai berikut :

1. Jika P value > 0.05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
2. Jika P value < 0.05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Cara mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan mengamati nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan TOLERANCE. Batas VIF adalah 10 dan nilai dari TOLERANCE adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai dari TOLERANCE adalah 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Bila ada variabel independen yang terkena multikolinearitas maka variabel tersebut harus dikeluarkan atau diperbaiki.

4. Autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain. Autokorelasi seringkali terjadi pada data time series dan dapat juga terjadi pada data cross section tetapi jarang. Keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model digunakan kriteria lain untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Santoso, 2000) :

1. Jika nilai $DW < -2$, maka ada autokorelasi positif
2. Jika $-2 \leq DW \leq 2$, maka tidak ada autokorelasi
3. Jika nilai $DW > 2$, maka ada autokorelasi negative

Hasil pengujian agar tidak menghasilkan persamaan yang bias, maka dilakukan uji statistik dan uji asumsi klasik. Uji statistik meliputi : uji F (uji koefisien regresi secara simultan) dan uji T (uji koefisien regresi secara parsial).

B. Uji Hipotesis

1. Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Pada penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) menggunakan tingkat kesalahan (α) = 5 persen.

Hipotesis :

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = 0$$

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq 0 \text{ (minimal ada satu yang } \neq 0)$$

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Nilai signifikansi $\geq \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa F hitung $\geq F$ tabel. Sehingga tidak terdapat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas.
2. Nilai signifikansi $< \alpha$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa F hitung $< F$ tabel. Sehingga terdapat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas.

2. Uji T (Uji Koefisien Regresi Secara Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Pada penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) menggunakan tingkat signifikansi (α) = 5 persen.

Hipotesis :

$$H_0 : b_1 \leq ; b_2 \leq ; b_3 \leq ; b_4 \leq ; b_5 \leq 0$$

$$H_a : b_1 > ; b_2 > ; b_3 > ; b_4 > ; b_5 > 0$$

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Nilai signifikansi $\geq \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa T hitung $\geq T$ tabel. Sehingga tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.
2. Nilai signifikansi $< \alpha$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa T hitung $< T$ tabel. Sehingga terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, seberapa besar persentase total variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model. Nilai koefisien determinasi berada pada selang 0 (nol) – 1 (satu), semakin besar koefisien R^2 maka semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai R^2 yang kecil / mendekati nol, berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau kecil.
2. Nilai R^2 yang besar mendekati 1, berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen

IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Keadaan Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka dari itu perlu ditelusuri dan diketahui keadaan pelaku usaha dari sektor tersebut. Riau merupakan Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera, pada sektor pertanian di Provinsi Riau daerah tersebut memiliki jumlah tenaga kerja yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Penduduk Riau Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun Februari 2018 – Februari 2019

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun	
	Februari 2018	Februari 2019
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.194.881	1.193.549
Pertambangan dan Penggalian	27.131	25.642
Industri Pengolahan	218.934	264.107
Pengadaan Listrik dan Gas	19.293	21.043
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	146.737	162.514
Bangunan	558.445	489.313
Perdagangan Besar dan Eceran	126.466	133.681
Transportasi dan Pergudangan	149.853	183.623
Inforamsi dan Komunikasi	19.162	28.343
Jasa Keuangan dan Asuransi, Persewaan Bangunan, Jasa Perusahaan	50.230	85.426
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	190.452	145.178
Jasa Pendidikan	225.924	215.131
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	55.236	64.829
Jasa lainnya	124.813	100.395
Total	3.107.557	3.112.774

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan Tabel 5 diketahui jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 1.193.549 jiwa, jumlah penduduk Provinsi Riau yang

bekerja pada sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya baik itu pada periode februari 2018 maupun februari 2019. Setelah diketahui banyaknya jumlah pelaku usaha dari sektor pertanian di Provinsi Riau, maka indikator untuk melihat kesejahteraan dari para pelaku usaha tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 6. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019

Rincian	2018	2019	Perubahan (%)
Indeks Harga Yang Diterima Petani	124.49	129.81	29.81
Indeks Harga Yang Dibayar Petani	132.16	135.81	35.81
Konsumsi Rumah Tangga	135.95	139.92	39.92
Bahan Makanan	143.84	147.54	47.54
Makanan Jadi	135.61	140.72	40.72
Perumahan	127.83	130.66	30.66
Sandang	131.85	137.02	37.02
Kesehatan	131.21	134.62	34.62
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	122.13	125.91	25.91
Transportasi Dan Komunikasi	126.26	130.20	30.20
Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal	117.03	119.21	19.21
Bibit	119.89	126.26	26.26
Obat-Obatan & Pupuk	113.57	115.51	15.51
Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	107.46	108.21	8.21
Transportasi	130.56	133.88	33.88
Penambahan Barang Modal	121.35	123.44	23.44
Upah Buruh Tani	114.38	115.96	15.96
Nilai Tukar Petani	97.97	95.59	-4.41

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 6 menunjukkan tingkat kesejahteraan petani berada pada angka rata-rata sebesar 95,59 pada tahun 2019, nilai ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 97,97 pada tahun 2018. Penurunan nilai tukar petani ini disebabkan karena adanya kenaikan pada indeks yang dibayarkan petani (Ib) yang sebelumnya sebesar 132,16 naik menjadi 135,81 atau naik sebesar 35,81%, meskipun indeks yang

diterima (It) petani juga ikut naik namun kenaikan terhadap biaya yang dikeluarkan petani lebih besar. Kenaikan pada indeks yang dibayarkan (Ib) petani terjadi pada semua komponen yang dibayarkan, dengan adanya kejadian inilah yang menyebabkan nilai tukar petani turun sebesar -4,41%.

4.2. Keadaan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan

Tabel 7. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019

Rincian	2018	2019
Indeks Harga Yang Diterima Petani	136,69	139,11
Padi	132,22	132,42
Palawija	149,31	157,98
Indeks Harga Yang Dibayar Petani	133,86	137,75
Konsumsi Rumah Tangga	136,47	140,64
Bahan Makanan	144,97	149,23
Makanan Jadi	135,55	140,64
Perumahan	127,60	129,95
Sandang	131,71	137,19
Kesehatan	130,75	134,25
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	124,65	129,01
Transportasi Dan Komunikasi	124,23	127,92
Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal	119,67	121,99
Bibit	113,38	113,97
Obat-Obatan & Pupuk	126,57	129,88
Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	119,73	123,53
Transportasi	135,59	139,11
Penambahan Barang Modal	122,98	125,94
Upah Buruh Tani	114,30	115,73
Nilai Tukar Petani	102,11	100,99
Produksi (Ton)	561.705,00	626.578,93

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 7 menunjuka pada akhir tahun 2019 nilai tukar petani tanaman pangan di Provinsi Riau berada pada angka 100,99 lebih kecil dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 102,11, kenaikan juga terjadi terhadap indeks yang diterima petani (It) dan indeks yang dibayarkan petani (Ib), meskipun demikian nilai tukar usaha pertanian justru mengalami penurunan. Pada kondisi disaat

produksi tanaman pangan Provinsi Riau meningkat justru tidak memberikan efek positif terhadap nilai tukar petani, hal ini disebabkan biaya yang dikeluarkan petani seimbang dengan naiknya pendapatan yang diterimanya.

4.3. Keadaan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Hortikultura

Tabel 8. Nilai Tukar Petani Tanaman Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019

Rincian	2018	2019
Indeks Harga Yang Diterima Petani	130,81	134,62
Sayur-Sayuran	127,33	129,52
Buah-Buahan	134,64	140,15
Indeks Harga Yang Dibayar Petani	132,90	136,51
Konsumsi Rumah Tangga	136,48	140,42
Bahan Makanan	144,63	148,23
Makanan Jadi	135,99	141,16
Perumahan	129,06	132,03
Sandang	132,71	138,23
Kesehatan	131,41	134,89
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	120,87	124,49
Transportasi Dan Komunikasi	124,34	128,14
Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal	115,71	117,73
Bibit	126,12	128,80
Obat-Obatan & Pupuk	115,48	116,79
Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	110,62	113,20
Transportasi	116,73	119,98
Penambahan Barang Modal	122,44	125,96
Upah Buruh Tani	111,59	113,32
Nilai Tukar Petani	98,43	98,61
Produksi Sayur (Ton)	91.631,00	72.269,00
Produksi Buah (Ton)	152.041,00	156.213,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 8 menunjukkan nilai tukar petani di sub sektor tanaman hortikultura mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu dari sebesar 98,43 menjadi 98,61, meskipun peningkatan nilai tukar petani ini hanya sedikit, namun ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan pada sektor tanaman hortikultura. Produksi sektor tanaman hortikultura juga mengalami perubahan pada tanaman sayuran, yaitu adanya penurunan produksi dari sebanyak 91.631 ton

menjadi 72.269 ton, dan meningkatnya produksi tanaman buah-buah dari sebanyak 152.041 ton menjadi 156.213 ton.

4.4. Keadaan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Perkebunan

Tabel 9. Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019

Rincian	2018	2019
Indeks Harga Yang Diterima Petani	127,48	126,52
Tanaman Perkebunan Rakyat	127,48	126,52
Indeks Harga Yang Dibayar Petani	133,39	137,06
Konsumsi Rumah Tangga	136,24	140,20
Bahan Makanan	144,14	147,75
Makanan Jadi	135,58	140,69
Perumahan	128,51	131,57
Sandang	131,38	136,47
Kesehatan	131,18	134,44
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	121,73	125,54
Transportasi Dan Komunikasi	127,53	131,70
Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal	117,46	119,52
Bibit	119,72	128,86
Obat-Obatan & Pupuk	109,73	111,13
Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	101,34	100,86
Transportasi	136,62	140,42
Penambahan Barang Modal	124,06	125,74
Upah Buruh Tani	116,75	118,70
Nilai Tukar Petani	95,57	92,31
Produksi (Ton)	8.445.923,00	8.261.779,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 9 menunjukkan nilai tukar petani sub sektor tanaman perkebunan mengalami penurunan, pada tahun sebelumnya sudah berada dibawah angka 100 yakni sebesar 95,57 dan kemudian turun menjadi 92,31, penurunan ini terjadi disebabkan karena kenaikan indeks yang dibayarkan petani (Ib) lebih besar dibandingkan dengan indeks yang diterimanya (It). Selain komponen biaya produksi yang mengalami peningkatan kebutuhan akan konsumsi rumah tangga turut serta mengalami peningkatan ditambah dengan menurunnya hasil produksi sektor perkebunan yang menjadi pemicu turunnya nilai tukar petani di sektor

tersebut, juga turunnya pendapatan yang diterima petani juga menjadi penyebab penting menurunnya nilai tukar petani sektor perkebunan.

4.5. Keadaan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan

Tabel 10. Nilai Tukar Petani Peternakan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019

Rincian	2018	2019
Indeks Harga Yang Diterima Petani	124,24	125,68
Ternak Besar	129,51	131,16
Ternak Kecil	125,08	127,69
Unggas	115,64	116,21
Hasil Ternak	129,93	135,00
Indeks Harga Yang Dibayar Petani	126,48	130,02
Konsumsi Rumah Tangga	135,17	139,18
Bahan Makanan	144,09	148,09
Makanan Jadi	135,61	140,75
Perumahan	125,11	127,04
Sandang	132,65	137,67
Kesehatan	131,40	134,89
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	121,83	125,40
Transportasi Dan Komunikasi	125,26	129,15
Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal	113,08	115,93
Bibit	120,38	124,6
Obat-Obatan & Pupuk	112,16	115,95
Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	118,83	120,77
Transportasi	112,54	114,23
Penambahan Barang Modal	106,60	107,75
Upah Buruh Tani	109,26	109,66
Nilai Tukar Petani	98,23	96,66
Produksi Daging (Ton)	78.500,54	76.961,32
Produksi Telur (Ton)	19.228,37	19.612,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 10 menunjukkan nilai tukar petani pada sub sektor peternakan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 98,23 menjadi sebesar 96,66 tahun 2019, jika dilihat dari komponen penyusunnya kenaikan indeks yang dibayarkan petani (Ib) lebih meningkat dibandingkan nilai indeks yang diterima petani (It), kenaikan yang banyak terjadi pada nilai konsumsi petani yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran terhadap biaya produksinya.

4.6. Keadaan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan

Tabel 11. Nilai Tukar Petani Perikanan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019

Rincian	2018	2019
Indeks Harga Yang Diterima Petani	147,34	147,27
Penangkapan	155,58	155,72
Budidaya	134,90	134,50
Indeks Harga Yang Dibayar Petani	128,16	131,13
Konsumsi Rumah Tangga	132,41	136,01
Bahan Makanan	135,12	137,85
Makanan Jadi	135,23	140,38
Perumahan	125,60	129,22
Sandang	133,68	138,85
Kesehatan	131,79	136,27
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	123,86	126,88
Transportasi Dan Komunikasi	123,07	125,49
Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal	119,23	120,89
Bibit	124,09	125,73
Obat-Obatan & Pupuk	126,48	127,42
Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	110,31	110,83
Transportasi	125,74	127,59
Penambahan Barang Modal	124,89	129,41
Upah Buruh Tani	106,80	107,51
Nilai Tukar Petani	114,97	112,31
Produksi	143.921,51	145.411,01

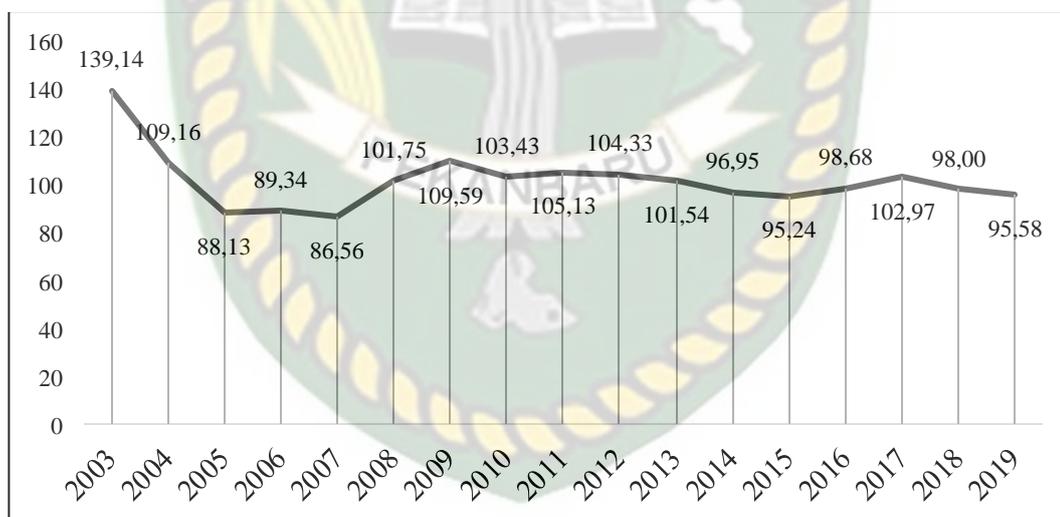
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 11 menunjukkan nilai tukar petani sub sektor perikanan yang dihasilkan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 114,97 menjadi sebesar 112,31 tahun 2019, penurunan pada nilai tukar petani ini juga disebabkan karena naiknya nilai indeks yang dibayarkan (Ib) petani perikanan lebih besar dibandingkan nilai indeks yang diterima petani (It) berada pada angka yang tidak berubah jauh. Sedangkan untuk produksi yang dihasilkan pada sub sektor perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 143.921,51 ton menjadi sebanyak 145.411,01 ton di tahun 2019.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau Dan Variabel-Variabel Yang Mempengaruhinya

Keberhasilan Indonesia dalam melakukan pembangunan terhadap sektor pertanian dapat dilihat dan diukur dari indeks angka Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, pada gambar 5 terlihat bahwa indeks nilai NTP sektor pertanian yang ada di Provinsi Riau cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2018 dan 2019 di Provinsi Riau berada di bawah angka 100, hal ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kesejahteraan petani pada periode tersebut.



Gambar 5. Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Sedangkan angka NTP tertinggi yang pernah diraih oleh Provinsi Riau adalah pada tahun 2003 yaitu sebesar 139,14 pada masa itu, untuk nilai NTP terendah yaitu terjadi pada tahun 2007 dengan angka sebesar 86,56. Angka persentase pertumbuhan Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Persentase Pertumbuhan NTP Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019

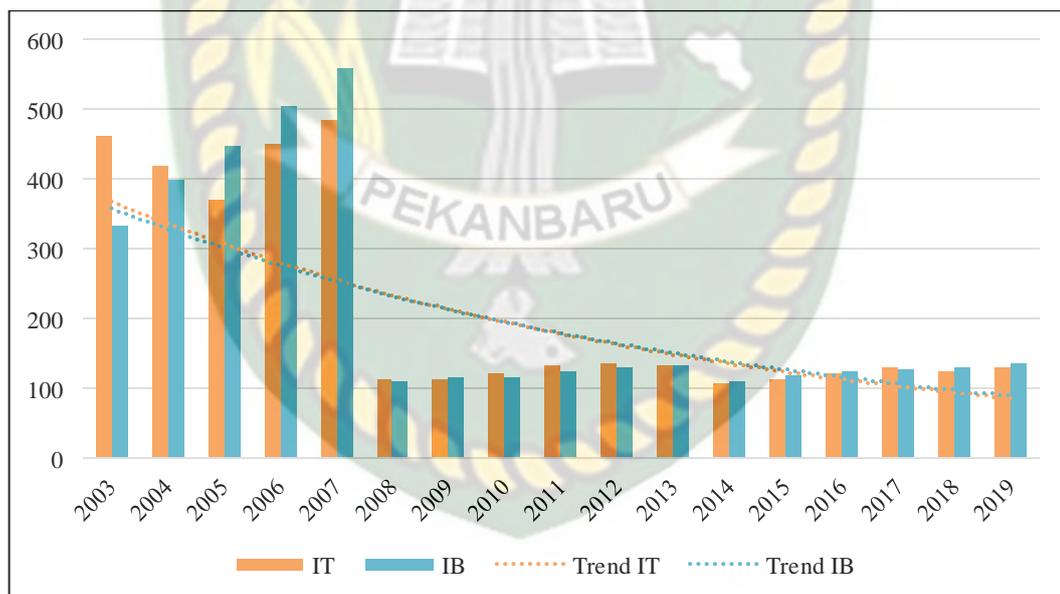
Tahun	NTP (Indeks)	Perubahan (%)	Keterangan
2003	139,14	-	-
2004	109,16	-21,55	Turun
2005	88,13	-19,27	Turun
2006	89,34	1,37	Naik
2007	86,56	-3,11	Turun
2008	101,75	17,55	Naik
2009	109,59	7,71	Naik
2010	103,43	-5,62	Turun
2011	105,13	1,64	Naik
2012	104,33	-0,76	Turun
2013	101,54	-2,67	Turun
2014	96,95	-4,52	Turun
2015	95,24	-1,76	Turun
2016	98,68	3,61	Naik
2017	102,97	4,35	Naik
2018	98,00	-4,83	Turun
2019	95,58	-2,47	Turun
Perubahan Selama 17 Tahun		-35,40 %	

Tabel 12 menunjukkan bahwasannya NTP di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan, kecenderungan perubahan terbesar terjadi pada tahun 2004 yang mengalami penurunan yakni turun sebesar 21,55% dibanding tahun sebelumnya, ini merupakan penurunan terbesar yang terjadi pada NTP di Provinsi Riau selama periode pengamatan dibanding tahun lainnya. Sedangkan untuk kecenderungan kenaikan pertumbuhan yang cukup besar terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 17,55% dibanding tahun sebelumnya.

Dapat diketahui bahwa NTP di Provinsi Riau tidak mengalami perkembangan yang pesat, namun cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. NTP di Provinsi Riau selama periode pengamatan mengalami perubahan penurunan sebanyak 10 kali, dan kenaikan sebanyak 6 kali. Selama tahun 2004, 2008, 2009, 2010 dan 2017 angka NTP Provinsi Riau berada diatas angka >100, yang memiliki

arti pada periode tersebut petani mengalami surplus, harga komoditas pertanian naik lebih besar dari kenaikan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Sedangkan pada tahun lainnya petani masih belum dapat dikatakan sejahtera karena nilai rata-rata NTP pada periode tersebut < 100 , dan laju pertumbuhan NTP di Provinsi Riau 17 tahun selama periode 2003 – 2019 yaitu mengalami penurunan sebesar 35,40 persen.

Bila dilihat dari komponen penyusun nilai indeks NTP, rendahnya nilai tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh rendahnya nilai indeks harga yang diterima petani (It) dan tingginya nilai indeks harga yang harus dibayar petani (Ib). Rendahnya It dapat dipengaruhi oleh rendahnya faktor berupa harga dasar komoditi pertanian, sedangkan dari sisi Ib disebabkan mahalny biaya produksi.



Gambar 6. Perkembangan Nilai IT & IB Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019
 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 6 menunjukkan perubahan yang terjadi pada tahun 2005 – 2007 pada saat itu nilai indeks yang dibayarkan petani (Ib) lebih besar dibandingkan dengan indeks yang diterimanya (It), selain itu pada tahun 2014, 2015, 2016, 2018 dan 2019 nilai indeks yang dibayarkan petani juga lebih tinggi dibandingkan yang

diterimanya, namun pada periode ini tidak terlalu berselisih jauh dibandingkan pada tahun 2005 – 2007, ini artinya petani mengeluarkan biaya-biaya output produksi dan pengeluaran rumah tangga/konsumsi lebih besar dibandingkan dengan hasil pendapatan yang diterimanya, hal ini disebabkan karena harga produk pertanian yang relatif masih berfluktuasi, tidak menetap sehingga kadangkala masih belum mencukupi untuk mencapai titik impas (*Break Even Point*) pada usaha pertanian.

Tabel 13. Perubahan Indeks IT & IB Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019

Tahun	IT	IB	Perubahan (%) IT	Perubahan (%) IB
2003	463,47	332,98	-	-
2004	420,70	399,37	-9,23	19,94
2005	369,97	449,53	-12,06	12,56
2006	449,76	503,93	21,57	12,10
2007	483,94	559,00	7,60	10,93
2008	112,70	110,83	-76,71	-80,17
2009	115,26	116,34	2,27	4,97
2010	122,07	118,02	5,91	1,44
2011	132,48	126,04	8,53	6,80
2012	135,56	129,93	2,33	3,09
2013	134,79	133,30	-0,57	2,59
2014	108,90	112,34	-19,21	-15,72
2015	113,37	119,05	4,10	5,97
2016	122,79	124,41	8,31	4,50
2017	131,47	127,67	7,07	2,62
2018	124,49	132,16	-5,31	3,52
2019	129,81	135,81	4,27	2,76
Rata - Rata 17 Tahun	240,31	229,87	-71,99	-59,21

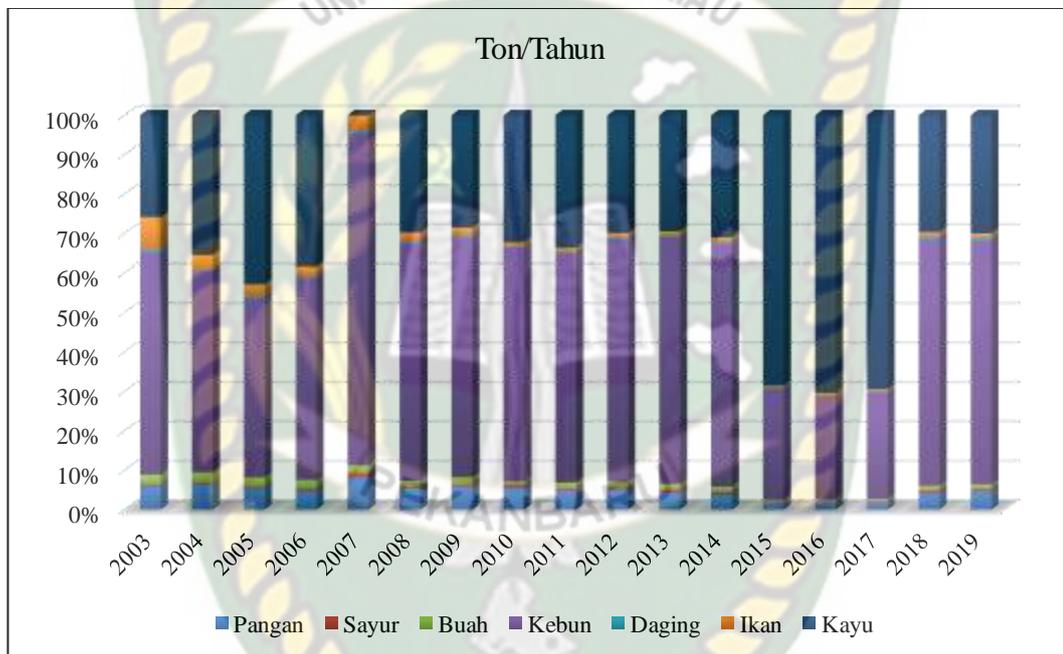
Tabel 13 menunjukkan petani dapat mengalami surplus pada usaha pertaniannya pada periode tahun 2003 – 2004 yang pada tahun tersebut nilai It lebih besar dibandingkan nilai Ib, periode ini merupakan masa dimana indeks yang diterima petani berselisih lebih besar dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan, secara berturut-turut nilai indeks yang diterima pada periode tersebut adalah sebesar 463,47 dan 420,70. Kemudian di periode lain yang menguntungkan petani juga

terjadi pada tahun 2008, 2010, 2011, 2012, dan 2017, namun angka selisih periode tahun ini tidak terlalu besar, yang artinya pada kurun waktu tersebut hasil yang diterima petani lebih besar dibandingkan biaya produksi yang dikeluarkan, dalam kurun waktu 17 tahun pada indeks yang diterima petani (It) adalah penurunan sebesar 71,99 persen dan perubahan pada indeks yang dibayarkan (Ib) petani menurun sebesar 59,21 persen.

Perubahan yang terjadi ini artinya selama periode tersebut terjadi penurunan jumlah pendapatan yang diterima petani atau penurunan It lebih besar dibandingkan penurunan Ib, ini mengindikasikan bahwa fluktuasi yang terjadi pada Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau tahun 2003 – 2019 cenderung disebabkan oleh faktor indeks yang dibayarkan petani (Ib). Selain itu tingginya nilai indeks harga yang dibayar petani dipengaruhi oleh tingginya rata-rata pengeluaran rumah tangga dan biaya input produksi yang dikeluarkan oleh petani. Bila dilihat dari pengeluaran rumah tangga yang dikeluarkan oleh petani Provinsi Riau hal ini dipengaruhi oleh konsumsi padi-padian, ubi-ubian dan hasil-hasilnya, daging dan hasil-hasilnya, ikan segar, ikan diawetkan, telur, susu dan hasil-hasilnya, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bumbu-bumbuan, lemak dan minyak, serta bahan makanan lainnya. Semua pengeluaran tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk mencukupi nilai gizi supaya tetap bertahan hidup dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pengeluaran input produksi dipengaruhi oleh faktor produksi yang digunakan oleh petani yaitu bibit tanaman, alsintan, sewa lahan, pupuk & obat-obatan, upah buruh tani, dan biaya pemasaran dll.

5.1.1. Perkembangan Produksi Sektor Pertanian di Provinsi Riau

Produksi sektor pertanian merupakan hasil usaha pertanian yang menghasilkan produk primer, hasil dari usaha ini adalah yang menentukan seberapa besar penghasilan yang akan diterima atau diperoleh untuk petani, semakin banyak produksi yang dihasilkan maka seharusnya hasil yang didapatkan juga meningkat, produksi ini merupakan perwakilan dari faktor yang diterima oleh petani (It), maka dari itu berikut adalah hasil produksi sektor pertanian di Provinsi Riau.



Gambar 7. Proporsi Produksi Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 7 menunjukkan proporsi hasil produksi sektor pertanian di Provinsi Riau secara garis besar dikuasai oleh subsektor tanaman perkebunan dan disusul oleh produksi kehutanan. Riau yang merupakan ladang penghasil minyak sawit tentu saja menjadi daya unggulan pada sektor pertanian yang ada di Provinsi Riau, namun bukan hanya kelapa sawit tetapi dalam sektor perkebunan juga terdapat tanaman perkebunan karet, kakao, dll. Kemudian disusul oleh produksi kehutanan, tanaman pangan, perikanan, dan seterusnya. Meskipun begitu hasil produksi sektor

pertanian di Provinsi Riau juga mengalami pasang naik turun setiap tahunnya, fluktuasi tersebut bisa berdampak positif maupun negatif terhadap nilai tukar petani sesuai harga pasarnya. Tabel produksi sektor pertanian secara angka dapat dilihat pada halaman lampiran.

5.1.2. Perkembangan Inflasi di Provinsi Riau

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, inflasi berkaitan erat dengan nilai tukar petani karena termasuk dalam komponen indeks dibayarkan petani (Ib), besarnya kenaikan dari harga barang dan jasa tersebut atau tingginya inflasi akan mempengaruhi indeks dibayarkan petani (Ib) sehingga dapat menurunkan kesejahteraan petani.



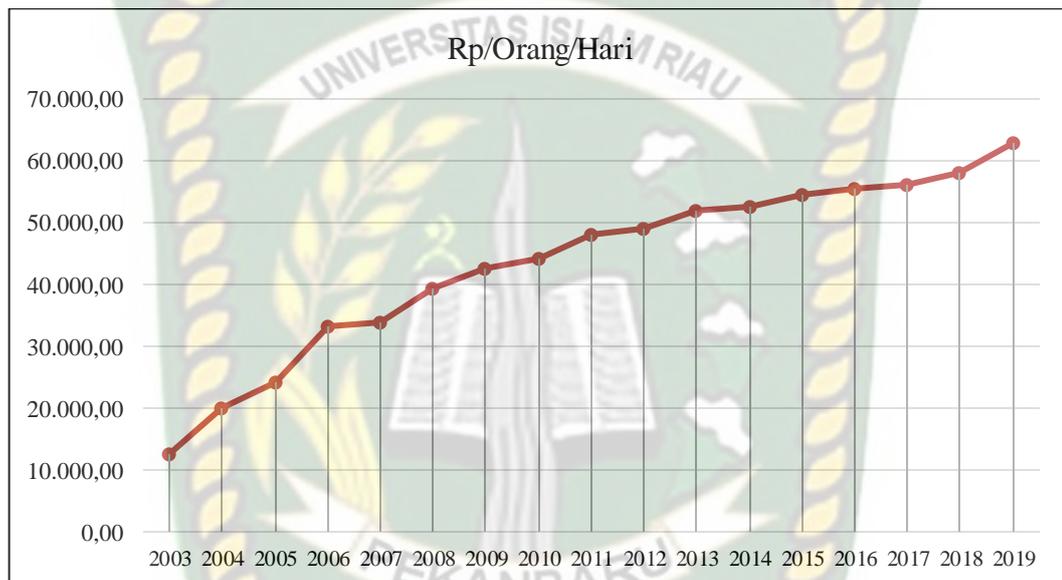
Gambar 8. Perkembangan Inflasi Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 8 menunjukkan perkembangan inflasi di Provinsi Riau cenderung mengalami penurunan dari tahun 2003 hingga tahun 2019, inflasi tertinggi yang ada dalam periode pengamatan terjadi pada tahun 2005 yaitu inflasi naik sebesar 17,10 persen, sedangkan inflasi terendah berada pada tahun 2009 yaitu 1,94 persen. Data inflasi dapat dilihat pada halaman lampiran.

5.1.3. Perkembangan Upah Buruh Tani di Provinsi Riau

Upah buruh tani merupakan rata-rata upah harian yang diterima oleh buruh tani sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan, upah buruh tani termasuk dalam komponen indeks yang dibayarkan petani (Ib), hal ini disebabkan semakin tinggi upah buruh tani maka pelaku usaha pertanian akan lebih banyak mengeluarkan biaya untuk upah buruh tani.



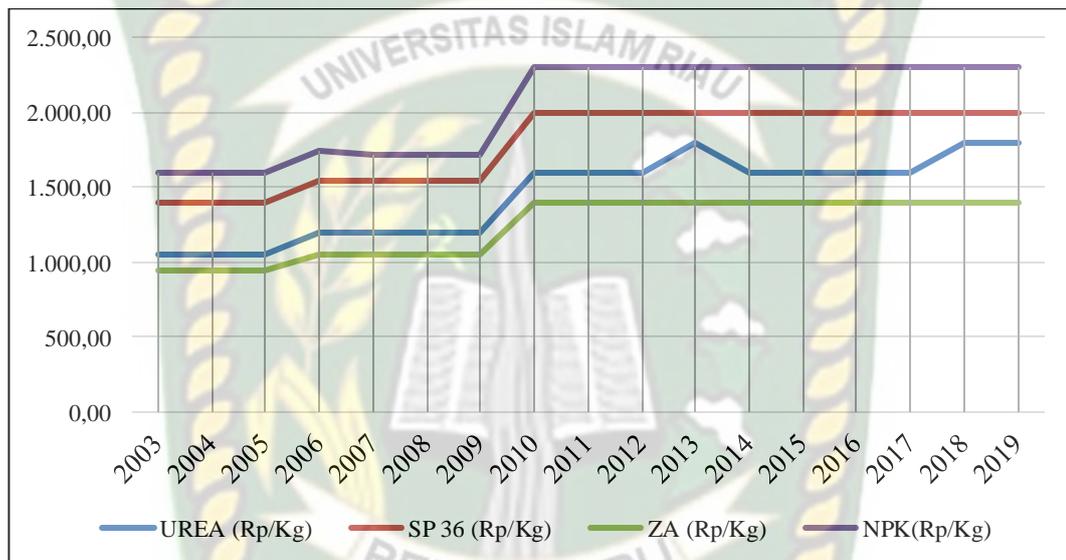
Gambar 9. Perkembangan Rata-Rata Upah Buruh Tani Provinsi Riau Tahun 2003 – 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 9 menunjukkan perkembangan upah buruh tani di Provinsi Riau setiap tahun mengalami kenaikan, kenaikan upah ini bisa berdampak positif bagi para buruh namun bisa berdampak negatif terhadap pelaku usaha pertanian yang akan meningkatkan biaya produksinya, hal ini dikarenakan upah buruh tani yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan/pekerjaan di sawah atau ladang pertanian dengan tidak menanggung resiko terhadap hasil panen dan bertujuan mendapatkan upah. Data upah buruh tani selengkapnya dapat dilihat pada halaman lampiran.

5.1.4. Perkembangan Harga Pupuk di Indonesia

Pupuk merupakan material yang digunakan atau ditambahkan pada media tanam untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman agar mampu berproduksi dengan baik, pupuk termasuk kedalam indeks yang dibayarkan petani (Ib) karena tergolong dalam biaya produksi, semakin tinggi harga pupuk atau semakin banyak pupuk digunakan akan mempengaruhi nilai tukar petani.



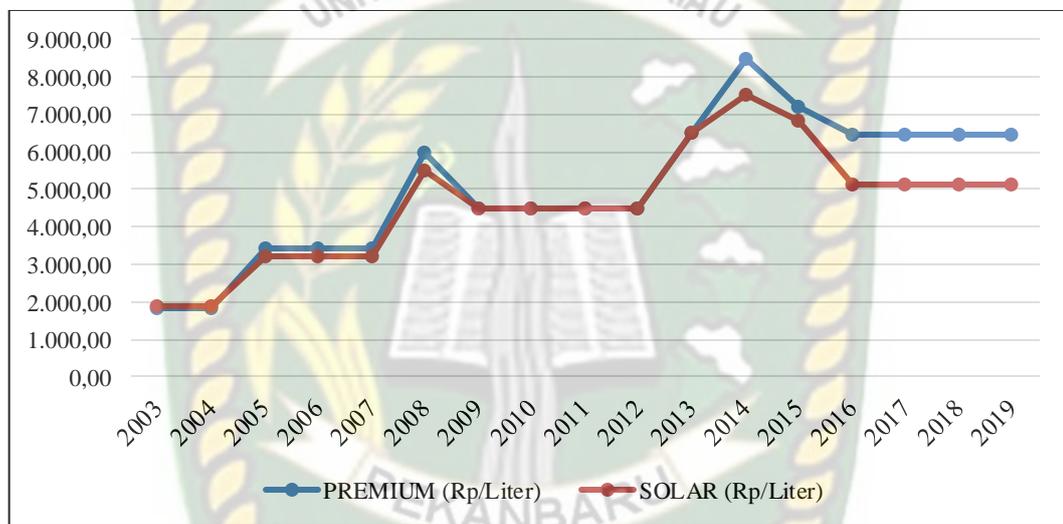
Gambar 10. Perkembangan Rata-Rata Harga Pupuk Subsidi Indonesia Tahun 2003 – 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 10 menunjukkan setiap tahun harga pupuk subsidi mengalami kenaikan, baik itu pupuk Urea, SP 36, ZA dan NPK. Pupuk Urea sempat mengalami penurunan harga pada tahun 2014 hingga tahun 2017, namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi. Sedangkan jenis pupuk yang lain tidak mengalami penurunan, harga menjadi stabil pada tahun 2010 hingga 2019. Program pemerintah dalam memberikan potongan harga atau subsidi terus dilakukan dalam upaya meringankan beban petani demi meningkatkan kesejahterannya. Data harga pupuk subsidi lebih lengkapnya dapat dilihat pada halaman lampiran.

5.1.5. Perkembangan Harga BBM di Indonesia

Hubungan antara harga BBM dan nilai tukar petani dikarenakan jika harga BBM naik maka menyebabkan meningkatnya barang yang digunakan untuk memproduksi hasil pertanian (alsintan), meningkatkan biaya konsumsi rumah tangga petani, biaya transportasi, pengangkutan, biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM). Harga BBM termasuk dalam komponen indeks yang dibayarkan petani (Ib), berikut adalah grafiknya.



Gambar 11. Perkembangan Harga BBM Indonesia Tahun 2003 – 2019

Sumber : Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, 2019

Gambar 11 menunjukkan perkembangan harga BBM di Indonesia pada tahun 2003 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, penurunan harga BBM terjadi pada beberapa periode yaitu pada tahun 2008 hingga 2009 dan penurunan harga BBM juga terjadi pada tahun 2014 hingga tahun 2016, penurunan harga ini serempak terjadi antara jenis BBM premium maupun solar. Pada tahun 2009 hingga tahun 2013 harga premium maupun solar berada pada harga yang sama pada periode tersebut, namun pada tahun 2013 hingga tahun 2019 harga premium lebih besar dibandingkan harga solar. Data harga BBM lebih lengkapnya dapat dilihat pada halaman lampiran.

5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau

Sebelum melakukan pengujian lebih lanjut terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik guna memperoleh suatu hasil estimasi penelitian yang bersifat BLUE (*Best Estimator Linier*) sehingga akan menghasilkan dugaan yang terbaik, linear, dan memiliki varians yang minimum dalam kelas sebuah dugaan tanpa bias, maka uji yang akan dilakukan yaitu : Normalitas, Heteroskedasitas, Multikolinearitas dan Autokorelasi.

5.2.1. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menentukan nilai sebaran data pada variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak, pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji *Jarque Bera*.

Tabel 14. Hasil Uji Normalitas

Sampel 2003 - 2019	
Observasi 17	
Mean	1,15E-15
Median	0,367172
Maximum	8,905848
Minimum	-10,512940
Std. Dev	5,773952
Skewness	-0,157770
Kurtosis	2,072613
Jarque-Bera	0,679725
Probability	0,711868

Tabel 17 menunjukkan uji normalitas dengan nilai Probability sebesar 0,71, keputusan dalam melihat apakah data berdistribusi normal atau tidaknya adalah dengan membandingkan dengan tingkat alpha 5 persen, nilai P pada probability $0,71 > 5$ persen sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual (kesalahan pengganggu) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Breusch Pagan Godfey*, metode ini digunakan karena tidak menghilangkan data koefisien dan pengurutan data.

Tabel 15. Hasil Uji Heteroskedasitas

F-statistic	1,502250	Prob. F(6.10)	0,2661
Obs*R-squared	6,898035	Prob. Chi-Square(6)	0,2283
Scaled explained SS	1,548909	Prob. Chi-Square(6)	0,9074

Tabel 15 menunjukkan hasil uji heteroskedasitas pada kolom Prob.F(6.10) dengan nilai Probabilitas atau P value sebesar $0,27 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa terbebas dari masalah heteroskedasitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah model regresi yang diestimasi terdapat masalah korelasi antar variabel bebas, model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, untuk melihat apakah variabel bebas memiliki korelasi dapat membandingkan nilai VIF dengan dasar keputusan > 10 terjadi multikolinearitas dan sebaliknya.

Tabel 16. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Koefisien Variasi	Uncentered VIF	Centered VIF
C	261,8334	91,79106	NA
X1	6,98E-14	7,42345	1,65324
X2	0,400556	7,33763	1,86267
X3	1,61E-07	87,99367	7,123824
X4	0,000188	179,04420	4,360477
X5	3,31E-06	33,59624	3,914026

Tabel 16 menunjukkan hasil uji autokorelasi pada kolom Centered VIF, dengan hasil setiap variabel bebas yang berada pada angka < 10 , maka disimpulkan variabel bebas tidak mengalami masalah multikolinearitas dan asumsi terpenuhi.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan masalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain, karena penelitian ini menggunakan data *time series* maka uji wajib dilakukan, metode pengujian uji autokorelasi yang digunakan adlah uji *Durbin Watson*.

Tabel 17. Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Mean dependent var	101,5012
S.D. dependent var	11,81364
Akaïke info criterion	6,98984
Schwarz criterion	7,28392
Hannan-Quinn criter.	7,01908
Durbin-Watson stat	1,53727

Tabel 17 menunjukkan nilai DW diperoleh sebesar 1,54, nilai tersebut berada diantara $-2 \leq 1,54 \leq 2$, sehingga dapat disimpulkan model regresi bebas dari masalah autokorelasi dan asumsi terpenuhi.

5.2.2. Uji Hipotesis

Setelah semua asumsi metode *Ordinary Least Square* (OLS) terpenuhi yaitu pada pengujian sebelumnya bahwa model regresi terbebas dari masalah normalitas, heteroskedasitas, multikolinearitas, dan autokorelasi, maka berikut ini adalah hasil estimasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau dengan variabel bebas yaitu produksi, inflasi, upah buruh tani, harga pupuk, dan harga BBM.

Tabel 18. Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau

Variabel	Parameter Estimasi	T hitung	Prob T	Elastisitas
Konstanta	122,17760	7,550560	0	-
X1 (Produksi)	0,0000000675	0,255570	0,8030	0,01
X2 (Inflasi)	-2,469207	-3,901400	0,0025	-0,15
X3 (Upah Buruh Tani)	-0,001969	-4,908900	0,0005	-0,73
X4 (Harga Pupuk)	0,035721	2,605490	0,0245	0,57
X5 (Harga BBM)	-0,001997	-1,097770	0,2958	-0,10
R-Square (R ²)				0,761121
F hitung				7,009667
F Sig				0,003570

Keterangan : *nyata pada taraf kepercayaan $\alpha = 5$ persen

Pengujian hipotesis yang pertama dilakukan adalah uji F (uji koefisien regresi secara simultan) uji ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara serempak atau bersamaan, Tabel 18 hasil uji statistik f menunjukkan, pada kolom F Sig diperoleh nilai Probabilitas sebesar $0,003570 < 0,05$ atau nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen, sehingga persamaan regresi yang diestimasi secara simultan mampu menjelaskan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas (produksi, inflasi, upah buruh tani, harga pupuk, dan harga BBM terhadap variabel Nilai Tukar Petani) di Provinsi Riau.

Pengujian hipotesis yang selanjutnya adalah uji t (uji koefisien regresi secara parsial), uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari variabel tak bebas terhadap variabel bebas secara individual, Tabel 18 menunjukkan hasil uji statistik t pada kolom Prob T dapat diketahui nilai signifikansi variabel independen terhadap variabel sebagai berikut :

1. X1 (Produksi) dengan nilai Probabilitas sebesar $0,803 > 0,05$ atau $P \text{ value} > \alpha$. artinya variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau.
2. X2 (Inflasi) dengan nilai Probabilitas sebesar $0,0025 < 0,05$ atau $P \text{ value} < \alpha$. ini artinya variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau.
3. X3 (Upah Buruh Tani) dengan nilai Probabilitas sebesar $0,0005 < 0,05$ atau $P \text{ value} < \alpha$. ini artinya variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau.
4. X4 (Harga Pupuk) dengan nilai Probabilitas sebesar $0,0245 < 0,05$ atau $P \text{ value} > \alpha$. ini artinya variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau.
5. X5 (Harga BBM) dengan nilai Probabilitas sebesar $0,2958 > 0,05$ atau $P \text{ value} > \alpha$. ini artinya variabel X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau.

Dari kelima (5) variabel independen yang diestimasi dengan persamaan regresi linear berganda terhadap variabel dependen yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), disimpulkan ada lima (3) variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Y (NTP) yaitu X2, X3, X4, atau dengan kata lain terdapat lima (3) faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani yang ada di Provinsi Riau yaitu Inflasi, Upah Buruh Tani, dan Harga Pupuk.

Uji hipotesis yang terakhir yang dilakukan yaitu uji *R-Square* (R^2), pengujian ini digunakan untuk mengetahui ketepatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas atau seberapa besar persentase total variasi variabel tak bebas

yang mampu dijelaskan oleh model regresi yang diestimasi. Tabel 18 menunjukkan hasil uji R^2 pada kolom *R-Square* (R^2) dengan diperoleh nilai sebesar 0,761121, angka ini menunjukkan proporsi penjelasan pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 76,1121%. Artinya variabel Produksi, Inflasi, Upah Buruh Tani, Harga Pupuk, dan Harga BBM memiliki proporsi pengaruh terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 76,1121% sedangkan sisanya 23,8879% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi.

5.2.3. Pengaruh Produksi Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau

Variabel Produksi secara signifikan tidak berpengaruh nyata terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ persen, nilai parameter estimasi sesuai dengan hipotesis menunjukkan angka positif yang berarti apabila produksi meningkat maka Nilai Tukar Petani (NTP) juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila apabila produksi menurun maka Nilai Tukar Petani (NTP) juga akan menurun. Nilai parameter estimasi produksi menunjukkan angka 0,0000000675, nilai ini artinya apabila produksi sektor pertanian meningkat 1 ton maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan meningkat sebanyak 0,0000000675. Kemudian pada nilai elastisitas produksi menunjukkan angka sebesar 0,01, nilai ini artinya apabila produksi sektor pertanian meningkat sebesar 1 persen, maka Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau akan meningkat sebanyak 0,01 persen.

Tidak signifikannya variabel produksi terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) didukung oleh penelitian sebelumnya, penelitian Finisuda (2018) menyatakan bahwa masalah produktivitas pertanian terutama pada sektor tanaman pangan disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan produktif pertanian, sehingga para petani kesulitan dalam memproduksi hasil-hasil pertanian secara maksimal.

(Kementrian Pertanian 2019), mengemukakan bahwa kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan produksi komoditas strategis hampir mencakup seluruh simpul sistem berproduksi, seperti kendala keseragaman mengadopsi teknologi, keterbatasan modal kerja, kurangnya pengawasan di lapangan, hingga kendala pemasaran produk hasil usahatani.

5.2.4. Pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau

Variabel Inflasi secara signifikan berpengaruh nyata terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau, pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ persen, nilai parameter estimasi sesuai dengan hipotesis menunjukkan angka negatif yang berarti apabila inflasi meningkat maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan menurun, begitu juga sebaliknya apabila inflasi menurun maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan meningkat. Nilai parameter estimasi inflasi menunjukkan angka $-2,469207$, nilai ini artinya apabila inflasi meningkat sebesar 1 persen, maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan menurun sebanyak $2,469207$. Kemudian pada nilai elastisitas inflasi menunjukkan angka sebesar $-0,15$, nilai ini artinya apabila inflasi meningkat sebesar 1 persen, maka Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau akan menurun sebanyak 0,15 persen.

Penelitian Finisuda (2018) menyatakan NTP yang rendah disebabkan karena adanya inflasi yang tinggi di daerah pedesaan yang mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, Inflasi yang tinggi menyebabkan harga-harga barang hasil produksi pertanian menjadi mahal, apabila harga-harga tersebut naik maka banyak masyarakat yang enggan untuk berbelanja hasil-hasil produksi pertanian, pada akhirnya para petani rugi dan kesejahteraan petani rendah.

Tulus (2003) menyatakan apabila inflasi tinggi atau harga-harga dari bahan-bahan pokok mengalami peningkatan, di satu sisi bisa menguntungkan petani

selama kenaikan tersebut untuk bahan-bahan makanan dan bersumber dari petani, sementara biaya produksi tetap tidak berubah, akan tetapi di sisi lain inflasi bisa juga berarti kerugian bagi petani.

5.2.5. Pengaruh Upah Buruh Tani Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau

Variabel Upah Buruh Tani secara signifikan berpengaruh nyata terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau, pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ persen. Nilai parameter estimasi sesuai dengan hipotesis menunjukkan angka negatif yang berarti apabila upah buruh tani meningkat maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan menurun, begitu pula sebaliknya jika upah buruh tani menurun maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan meningkat. Nilai parameter estimasi upah buruh tani menunjukkan angka $-0,001969$, nilai ini artinya apabila upah buruh tani meningkat 1 Rupiah, maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan menurun sebanyak $0,001969$. Kemudian pada nilai elastisitas upah buruh tani menunjukkan angka sebesar $-0,73$, nilai ini artinya apabila upah buruh tani meningkat sebesar 1 persen, maka Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau akan menurun sebanyak $0,73$ persen.

Penelitian Muhammad Ilham Riyadh (2015) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi NTP di Sumatera Utara adalah produktivitas hasil, luas lahan, biaya tenaga kerja, harga komoditas, dan harga pupuk yang secara parsial maupun serempak berpengaruh nyata terhadap NTP. Hal ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan petani tergantung kepada produktivitas hasil, luas lahan, biaya tenaga kerja, harga komoditas, dan harga pupuk.

Muhammad Zul Mazwan dan Masyhuri (2018) pada penelitian sebelumnya juga menyatakan jika faktor-faktor yang menurunkan nilai tukar petani tebu lahan sawah yaitu pengalaman petani, harga bibit, harga pupuk anorganik dan upah

tenaga kerja. Sedangkan pada lahan tegalan yaitu jumlah anggota keluarga dan upah tenaga kerja.

5.2.6. Pengaruh Harga Pupuk Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau

Variabel Harga Pupuk secara signifikan berpengaruh nyata terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau, pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ persen. Nilai parameter estimasi tidak sesuai dengan hipotesis menunjukkan angka positif, yang artinya apabila harga pupuk naik maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan ikut naik, dan sebaliknya apabila harga pupuk turun maka Nilai Tukar Petani akan ikut turun. Nilai parameter estimasi harga pupuk menunjukkan angka 0,035721, nilai ini artinya apabila harga pupuk naik sebesar 1 Rupiah maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan meningkat sebanyak 0,035721. Kemudian pada nilai elastisitas harga pupuk menunjukkan angka sebesar 0,57, nilai ini artinya apabila harga pupuk naik sebesar 1 persen maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan meningkat sebanyak 0,57 persen.

Pupuk subsidi yang diberikan pemerintah memberikan dampak nyata terhadap nilai tukar petani yang ada di Provinsi Riau, subsidi harga pupuk yang diberikan mampu meringankan biaya yang dikeluarkan petani untuk usahanya. Dengan meningkatnya harga pupuk maka pemerintah diharapkan memberikan subsidi harga pupuk kepada petani sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman pangannya yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Hanafie (2010), kebijakan subsidi bertujuan untuk menjaga harga dalam negeri supaya lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatan suatu komoditi atau harga internasionalnya. kebijakan ini dapat berupa subsidi pupuk, subsidi biaya angkut faktor produksi ke daerah pelosok, dan perbedaan tingkat bunga bank dalam pengambilan kredit.

5.2.7. Pengaruh Harga BBM Terhadap Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau

Variabel Harga BBM secara signifikan tidak berpengaruh nyata terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau, pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ persen. Nilai parameter estimasi sesuai hipotesis menunjukkan angka negatif yang berarti apabila harga BBM naik maka Nilai Tukar Petani (NTP) juga akan menurun, begitu pula sebaliknya jika harga BBM menurun maka Nilai Tukar Petani (NTP) juga akan meningkat. Nilai parameter estimasi harga BBM menunjukkan angka $-0,001997$, nilai ini artinya jika harga BBM naik sebesar 1 Rupiah maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan turun sebanyak $-0,001997$. Kemudian dengan nilai elastisitas harga BBM yang menunjukkan angka $-0,1$, nilai ini artinya jika harga BBM meningkat sebesar 1 persen, maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan turun sebanyak 0,1 persen.

Muhammad R. Ipango (2017) pada penelitiannya terhadulu menyatakan bahwa dampak dari kenaikan BBM terhadap Nilai Tukar Petani (NTP), dengan naiknya BBM mempengaruhi NTP dikarenakan meningkatnya barang yang digunakan untuk memproduksi hasil pertanian, meningkatkan biaya konsumsi rumah tangga petani, biaya transportasi, pengangkutan, biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM). Dan dengan menurunnya harga BBM belum juga terlalu mempengaruhi naiknya NTP, dikarenakan untuk peningkatan harga – harga komoditi hasil pertanian yang diusahakan petani tidak dapat melampaui harga – harga komoditi yang dibutuhkan oleh petani untuk konsumsi rumah tangganya, biaya produksi dan penambahan barang modal. Kondisi ini seharusnya perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian negara maka dari itu kesejahteraan dari pelaku usaha tersebut perlu diperhatikan, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau selama periode pengamatan tahun 2003 – 2019 mengalami penurunan sebanyak 10 kali, dan kenaikan sebanyak 6 kali, pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pada periode tersebut cenderung mengalami penurunan sebesar 35,40 persen. Penurunan ini disebabkan redahnya indeks yang dibayarkan petani (Ib) daripada indeks yang diterima petani (It), dalam kurun waktu 17 tahun indeks yang diterima petani (It) mengalami penurunan sebesar 71,99 persen dan perubahan pada indeks yang dibayarkan (Ib) petani menurun sebesar 59,21 persen, penurunan terhadap indeks yang diterima petani (It) lebih besar dibandingkan penurunan indeks yang dibayarkan (Ib) petani.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi yaitu :

1. Inflasi, apabila inflasi terus meningkat secara drastis ini akan menyebabkan pengeluaran petani semakin bertambah, belum lagi ditambah dengan pengeluaran untuk usaha pertanian, meningkatnya tingkat inflasi di provinsi Riau akan menyebabkan nilai indeks yang dibayarkan petani juga ikut meningkat.
2. Upah buruh tani, merupakan biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam mengelola usaha pertaniannya, meningkatnya upah buruh tani setiap tahun akan

menyebabkan meningkatnya pengeluaran petani untuk membalas jasa buruh tani, atau ikut serta meningkatkan nilai indeks yang dibayarkan petani (Ib).

3. Harga Pupuk, pupuk yang merupakan kebutuhan tanaman untuk memaksimalkan hasil produksi dengan harga non-subsidi akan membuat petani menjadi rugi dengan meningkatnya pada komponen Ib (indeks dibayarkan). Maka dari itu kebijakan subsidi terhadap pupuk merupakan langkah yang tepat oleh pemerintah dalam langkah melindungi pihak produsen.

6.2. Implikasi Kebijakan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka implikasi kebijakan dan saran yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Perlu adanya intervensi dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di provinsi Riau, yaitu dengan cara mengevaluasi ulang kebijakan-kebijakan untuk melindungi petani sehingga mampu meminimalisir biaya yang dikeluarkan petani dan meningkatkan kesejahteraannya.
2. Pada petani agar dapat meningkatkan kualitas hasil *output* pertaniannya agar dapat meningkatkan permintaan terhadap hasil-hasil produk pertanian yang ada di Provinsi Riau.
3. Perlunya pendekatan maupun peningkatan penggunaan teknologi pertanian atau alsintan kepada petani agar mampu meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan biaya dalam usaha pertaniannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'ân al- Karîm. Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Surat Quraisy (106) ayat 3-4
- Al- Qur'ân al- Karîm. Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Surat An-nissa (4) ayat 9
- Arlia, R.N. N, Hanani. Abdul, W.M. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang tahun 2013 – 2015. JURNAL HABITAT Vol 27 (2) : 66-71
- Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi. <https://bphmigas.go.id/>. Diakses pada 23 September 2021 17:43 PM
- BPS Indonesia. 2020. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2019. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 1995 – 2001. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2001 – 2007. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2009. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2010. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2011. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2012. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2013. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2014. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2015. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2016. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2017. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta

- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2018. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan 2019. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2019. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- _____. 2006. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2006. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta
- BPS Riau. 2020. Determinan Kemiskinan Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Agustus 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 1999. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2000. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2001. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2002. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2003. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2004. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2005. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2006. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2007. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2009. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru

- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2015. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- _____. 2020. Riau Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru
- Chritoporus, E. Armayadi. Muhardi. Surentu. 2020. *Factors affected farmer exchange rate and their relationship to life expectancy in Central Sulawesi*. Eurasia J Biosci 14:6245-6248
- CIFOR. 2007. *Capturing Nested Spheres of Poverty : A Model for Multidimensional Poverty Analysis and Monitoring*. Center for International Forestry Research (CIFOR). Indonesia
- Fita, F. Teguh H. A, Widjajanti. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Di Provinsi Jawa Timur. [Jurnal]. Karya Ilmiah Civitas Akademika Program Studi Ekonomi Pembangunan Tahun 2015
- Fikri, K. 2019. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. [Skripsi]. Fakultas Pertanian. Program Studi Agribisnis. Universitas Islam Riau
- Gujarati. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta
- Jamilah, S. Tarumun dan Djaimi. Analisis Faktor Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Ekonomi Rumah tangga Petani Padi Sawah Di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. *Jurnal Dinamika Pertanian* Volume 34 (1) : 1-10

- Kementrian Pertanian. 2019. Pembangunan Pertanian & Keterbukaan IP. Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta
- _____. 2019. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. <http://jdih.pertanian.go.id/>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 21:34 PM.
- Mazwan, M.Z. dan Masyhuri (2018) *Factors Affecting Farmer Exchange Rate of Sugarcane Farmer Plasma in PTPN XI*. *Agro Ekonomi*, 29 (2) : 323 – 334
- Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian Edisi Ketiga. PT Pustaka Lembaga Penelitian. Pendidikan. dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta
- Muhammad, R.I. 2017. Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat*, Vol 13 (3) : 91 – 98
- Myers, D.G. 2005. *Social Psychology*. McGraw-Hill. Pennsylvania 10 – 9.
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia, Jakarta
- Norizan, A. 2003. Kualiti Hidup Penduduk Pulau Negeri Terengganu ; Satu Kajian Di Pulau Redang Dan Pulau Perhentian
- Rachmat, M. 2000. Analisis Nilai Tukar Petani Indonesia. [Disertasi]. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian : Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Riyadh, M.I. 2015. Analisis Nilai Tukar Petani Komoditas Tanaman Pangan Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol. 6 (1) : 17 – 32
- Santoso, S. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Soekartawi, 2002. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian (Teori dan Aplikasi) Edisi Revisi 2002. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- _____. 2010. Agribisnis : Teori dan Aplikasinya. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Tambunan, T. T.H. 2003. Perkembangan Sektor Pertanian Di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Widarjono, A. 2007. Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta